

Perubahan Rencana Strategis

RENSTRA

Tahun 2016 s/d 2021



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya penyusunan “Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021”.

Perubahan Rencana Strategis ini secara garis besar mengupas tentang Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis yang memuat kebijaksanaan makro diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, saran, kritik dan arahan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan Perubahan Rencana Strategis ini.

Tenggarong, 10 Desember 2019

An. Kepala Dinas,
Sekretaris,

Hamdani, SE, M.Si
NIP. 19640909 198902 1 002

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016~2021

Pengarah	:	Ir. Muhammad Taufik (Kepala Dinas Perkebunan)
Penanggung Jawab	:	Hamdani, SE, M.Si (Sekretaris Dinas Perkebunan)
Ketua	:	Dayang Eva Srie D., S.Hut (Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan)
Sekretaris	:	John Laurens Barus, SE (Staf Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan)
Koordinator	:	1. Miswan, SP (Kepala Bidang Pengembangan Dan Perbenihan) 2. Nurul Huda, SP, M.Si (Kepala Bidang Produksi) 3. Ir. Syahrianto, MM (Kepala Bidang Perlindungan) 4. Abdul Samad, SP, MP (Kepala Bidang Usaha Dan Penyuluhan)

Diterbitkan Oleh :



DINAS PERKEBUNAN

Kabupaten Kutai Kartanegara Jl. Muso Bin Salim No. 12-13 Tenggarong

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN	6
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan	6
2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan	10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan.....	18
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan.....	23
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan	24
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian Dan RENSTRA Provinsi	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	40
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	46

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan	46
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
VIII. PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	10
Tabel 2.2.2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Esselon.....	11
Tabel 2.2.3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan.....	11
Tabel 2.2.4.	Tenaga Harian Lepas (THL)	12
Tabel 2.2.5.	Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan	13
Tabel 2.2.6.	Unit Usaha Dinas Perkebunan.....	17
Tabel 2.3.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2016 s/d 2018	18
Tabel 2.3.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2016 s/d 2018.....	21
Tabel 3.3.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator & Target Kinerja Rancangan Awal Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	30
Tabel 3.4.1.	Sistem dan Fungsi Perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	33
Tabel 3.4.2.	Klasifikasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....	37
Tabel 3.5.1.	Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFAS) Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	41
Tabel 3.5.2.	Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFAS) Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	42
Tabel 3.5.3.	Analisis SWOT untuk Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	45
Tabel 4.6.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan.....	46
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	47
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	50
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	9
Gambar 3.1.	Profil Strategi Peningkatan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	43

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renstra Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna dibutuhkan sinkronisasi antara pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dengan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rencana kinerja daerah sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman rencana kinerja Perangkat Daerah. Rencana kinerja Perangkat Daerah tersusun dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai Fungsi untuk memahami arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Dinas Perkebunan menjadi landasan perencanaan kegiatan pada bidang Ekonomi dan Program Pembangunan Perkebunan untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi berdasarkan bidang terkait untuk mengantisipasi perkembangan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Adapun keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Provinsi dan Renja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan merupakan implementasi dari janji Kepala Daerah mengenai program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, serta memiliki keterkaitan dalam menentukan visi dan misi yang ditetapkan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi, sehingga dapat menunjang visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah harus berpedoman pada program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Maka antara RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Provinsi, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dan saling mendukung.

Sementara alasan dilakukannya Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021 sendiri sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka Renstra Dinas Perkebunan juga harus dilakukan perubahan, dimana tahapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Dimana Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan meliputi : Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra sekurang-kurangnya memuat sistematika sebagai berikut : pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan serta Penutup.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman;
4. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
11. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman;
12. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/K.531/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
21. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/273/Kpts-Disbun/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 55 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan;
26. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 96 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan;
27. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 050/1959/BAPPEDA Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan perkebunan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah :

- a) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- b) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra ini digunakan sebagai instrumen perencanaan, pengendali, pengarah dan sekaligus berfungsi sebagai pengukur keberhasilan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara operasional, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan, berisi tentang :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan

- BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan**, berisi tentang :
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian Dan RENSTRA Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Tujuan Dan Sasaran**, berisi tentang :
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- BAB VIII Penutup**

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Unsur Pemerintahan dibidang Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai **Tugas Pokok** membantu Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan **Tugas Pembantuan** di Bidang Perkebunan. Dalam pelaksanaannya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perkebunan.
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkebunan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perkebunan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan suatu wadah/tempat organisasi, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 55 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Pengembangan dan Perbenihan :
 - a. Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
 - b. Seksi Pengembangan Areal
 - c. Seksi Perbenihan

4. Bidang Produksi :
 - a. Seksi Teknologi dan Budidaya
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Alat dan Mesin
5. Bidang Usaha dan Penyuluhan :
 - a. Seksi Pembinaan dan Gangguan Usaha
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - c. Seksi Penyuluhan
6. Bidang Perlindungan :
 - a. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Seksi Pengendalian Lingkungan
 - c. Seksi Sarana Perlindungan

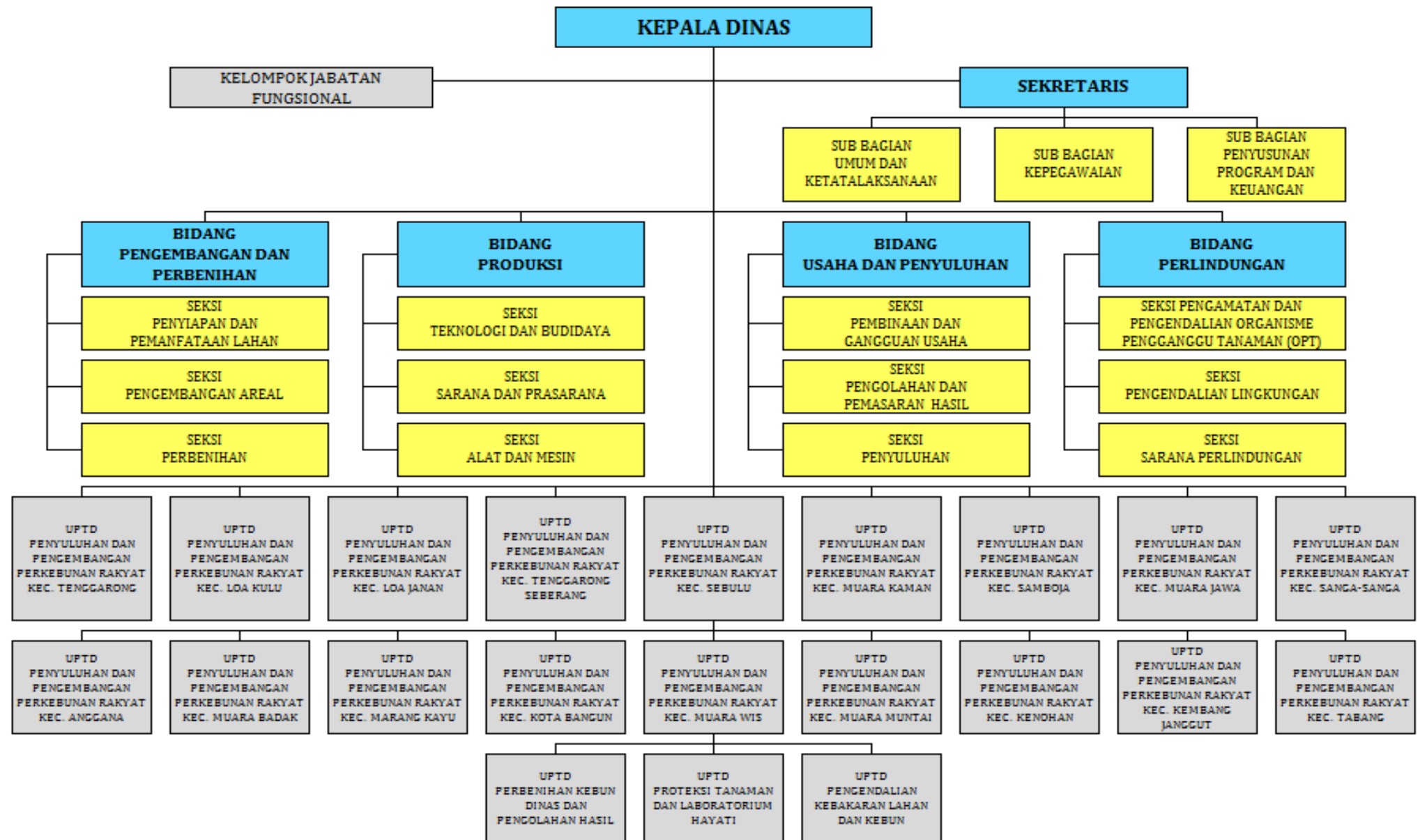
Dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional sektor Perkebunan yang meliputi 18 Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 96 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perkebunan yaitu :

1. UPTD Perbenihan Kebun Dinas Dan Pengolahan Hasil
2. UPTD Proteksi Tanaman Dan Laboratorium Hayati
3. UPTD Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun
4. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tenggarong
5. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Loa Kulu
6. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Loa Janan
7. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tenggarong Seberang
8. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Sebulu
9. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Kaman
10. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Samboja
11. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Jawa
12. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Sanga-Sanga
13. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Anggana
14. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Badak
15. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Marang Kayu
16. UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kota Bangun

- 17.UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Wis
- 18.UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Muara Muntai
- 19.UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kenohan
- 20.UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Kembang Janggut
- 21.UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kecamatan Tabang

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Gambar 2.1. : Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara



2.2. SUMBER DAYA DINAS PERKEBUNAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan

Dalam melaksanakan Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL). Hingga tahun 2018 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 196 orang, sedangkan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) adalah sebanyak 80 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel 2.2.1. : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Gender		Jumlah
		P	W	
1	IV/C	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2	IV/B	2 Orang	0 Orang	2 Orang
3	IV/A	7 Orang	4 Orang	11 Orang
4	III/D	15 Orang	8 Orang	23 Orang
5	III/C	17 Orang	13 Orang	30 Orang
6	III/B	9 Orang	9 Orang	18 Orang
7	III/A	6 Orang	2 Orang	8 Orang
8	II/D	10 Orang	4 Orang	14 Orang
9	II/C	52 Orang	21 Orang	73 Orang
10	II/B	7 Orang	1 Orang	8 Orang
11	II/A	3 Orang	1 Orang	4 Orang
12	I/D	1 Orang	0 Orang	1 Orang
13	I/C	3 Orang	0 Orang	3 Orang
14	I/B	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah		133 Orang	63 Orang	196 Orang

Sumber Data : Dinas Perkebunan (2018)

Tabel 2.2.2. : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Esselon

No.	Esselon	Gender		Jumlah
		P	W	
1	Esselon II/B	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2	Esselon III/A	1 Orang	0 Orang	1 Orang
3	Esselon III/B	3 Orang	1 Orang	4 Orang
4	Esselon IV/A	22 Orang	9 Orang	31 Orang
5	Esselon IV/B	11 Orang	9 Orang	20 Orang
6	Non Esselon	95 Orang	44 Orang	139 Orang
Jumlah		133 Orang	63 Orang	196 Orang

Sumber Data : Dinas Perkebunan (2018)

Tabel 2.2.3. : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Gender		Jumlah
		P	W	
1	SD	5 Orang	0 Orang	5 Orang
2	SLTP	2 Orang	0 Orang	2 Orang
3	SLTA	73 Orang	29 Orang	102 Orang
4	DIPLOMA 1	1 Orang	0 Orang	1 Orang
5	DIPLOMA 1	1 Orang	0 Orang	1 Orang
6	DIPLOMA 1	2 Orang	1 Orang	3 Orang
7	SARJANA (S 1)	39 Orang	26 Orang	65 Orang
8	PASCA SARJANA (S 2)	10 Orang	7 Orang	17 Orang
Jumlah		133 Orang	63 Orang	196 Orang

Sumber Data : Dinas Perkebunan (2018)

2) Tenaga Harian Lepas (THL)

Tabel 2.2.4. : Tenaga Harian Lepas (THL)

No.	Keterangan	Gender		Jumlah
		P	W	
1	Tenaga Pendukung Pengetikan Komputer	8 Orang	9 Orang	17 Orang
2	Tenaga Pendukung Konseptor	5 Orang	2 Orang	7 Orang
3	Pelayanan Administrasi Pimpinan (Portir)	2 Orang	2 Orang	4 Orang
4	Tenaga Pendukung Administrasi	10 Orang	16 Orang	26 Orang
5	Tenaga Pendukung Pelayanan Tamu	0 Orang	1 Orang	1 Orang
6	Tenaga Pendukung Pengantar Surat	1 Orang	0 Orang	1 Orang
7	Tenaga Kebersihan	5 Orang	0 Orang	5 Orang
8	Tenaga Sopir	1 Orang	0 Orang	1 Orang
9	Tenaga Penjaga Kantor	17 Orang	0 Orang	17 Orang
10	Tenaga Pelayanan Perbekalan	1 Orang	0 Orang	1 Orang
Jumlah		50 Orang	30 Orang	80 Orang

Sumber Data : Dinas Perkebunan (2018)

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perkebunan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan berasal dari anggaran APBD Tingkat I, APBD Tingkat II maupun APBN, dimana dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.5. : Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Perkebunan Lain-lain	1 Persil	22.164 Ha
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6 Persil	16.295 Ha
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	4 Persil	3.360.375 Ha
4	AC Split	25 Unit	
5	AC Unit	8 Unit	
6	Alat Dapur Lainnya	24 Unit	
7	Alat Dapur Lainnya	10 Unit	
8	Alat Dapur Lainnya	24 Unit	
9	Alat Dapur Lainnya	24 Unit	
10	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	19 Unit	
11	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	18 Unit	
12	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	18 Unit	
13	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	4 Unit	
14	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	9 Unit	
15	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	6 Unit	
16	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	3 Unit	
17	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	9 Unit	
18	Alat Penghancur Kertas	7 Unit	
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 Unit	
20	Alat-alat Peternakan Lain-lain	1 Unit	
21	Amplifiler	1 Unit	
22	Bola Api	4 Unit	
23	Camera Electronic	8 Unit	
24	Camera Film	49 Unit	
25	Camera Video	21 Unit	
26	CCTV	11 Unit	
27	Digital	15 Unit	
28	Digital Audio Storage System	6 Unit	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
29	Digitizer	1 Unit	
30	Disk Pack	22 Unit	
31	Dispenser	22 Unit	
32	Electric Generating Set Lain-lain	1 Unit	
33	External	4 Unit	
34	Facsimile	2 Unit	
35	Filling Besi/Metal	9 Unit	
36	Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)	4 Unit	
37	Global Positioning System	35 Unit	
38	Gorden	4 Unit	
39	Gunting Stek	30 Unit	
40	Handy Cam	3 Unit	
41	Hard Disk	45 Unit	
42	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1 Unit	
43	Keyboard	1 Unit	
44	Kipas Angin	11 Unit	
45	Kompas	1 Unit	
46	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	108 Unit	
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8 Unit	
48	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1 Unit	
49	Kursi Lipat	351 Unit	
50	Kursi Rapat	24 Unit	
51	Kursi Tamu	15 Unit	
52	Lap Top	17 Unit	
53	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	26 Unit	
54	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2 Unit	
55	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2 Unit	
56	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5 Unit	
57	Lemari Es	4 Unit	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
58	Lemari Kayu	33 Unit	
59	Meja Biro	60 Unit	
60	Meja Kayu/Rotan	53 Unit	
61	Meja Kerja	26 Unit	
62	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	22 Unit	
63	Meja Komputer	16 Unit	
64	Meja Piket	4 Unit	
65	Meja Rapat	20 Unit	
66	Memori Programmer	4 Unit	
67	Mesin Absensi	32 Unit	
68	Mesin Calculator	2 Unit	
69	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3 Unit	
70	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	25 Unit	
71	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	
72	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	20 Unit	
73	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	
74	Mesin Potong Rumput	4 Unit	
75	Microphone/Wireless Mic	15 Unit	
76	Mobil Pemadam Kebakaran	1 Unit	
77	Monitor	5 Unit	
78	Note Book	74 Unit	
79	Overhead Projektor	4 Unit	
80	P.C Unit	49 Unit	
81	Papan Nama Instansi	19 Unit	
82	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	44 Unit	
83	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	115 Unit	
84	Peralatan Jaringan Lain-lain	2 Unit	
85	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2 Unit	
86	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	17 Unit	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
87	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2 Unit	
88	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	15 Unit	
89	Perkakas Kantor	15 Unit	
90	Pesawat Telephone	13 Unit	
91	Pick Up	2 Unit	
92	Plotter	2 Unit	
93	Printer	107 Unit	
94	Proyektor + Attachment	2 Unit	
95	Radio	1 Unit	
96	Scanner	1 Unit	
97	Sepeda Motor	129 Unit	
98	Server	3 Unit	
99	Sofa	27 Unit	
100	Sound System	4 Unit	
101	Stabilisator	7 Unit	
102	Staion Wagon	8 Unit	
103	Suction Hose (Selang Hisap)	3 Unit	
104	Tabung Gas	1 Unit	
105	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	7 Unit	
106	Tangga Alumunium	2 Unit	
107	Televisi	19 Unit	
108	Trafo Stater	1 Unit	
109	Unintemuptible Power Supply (UPS)	55 Unit	
110	Video Camera dan Recorder	1 Unit	
101	White Board	1 Unit	
111	Wireless	11 Unit	
112	Wireless Amplifier	15 Unit	
113	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2 Unit	
114	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 Unit	

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
115	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	5 Unit	
116	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1 Unit	
117	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	5 Unit	
118	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen	2 Unit	
119	Scanner	1 Unit	
Total		1.963 Unit	

Sumber Data : Dinas Perkebunan (2018)

2.2.3. Unit Usaha Dinas Perkebunan

Hingga tahun 2018 Dinas Perkebunan telah memiliki Kebun Dinas seluas 46,6 Ha yang tersebar di 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.6. : Unit Usaha Dinas Perkebunan

No.	Uraian	Luas		Komoditi
		Lahan	Tanaman	
1	Kebun Dinas Di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Bukit Biru	13,6 Ha	1 Ha	Lada
2	Kebun Dinas Di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Loa Ipuh Darat	22 Ha	12 Ha	Kelapa Sawit
3	Kebun Dinas Di Kecamatan Loa Kulu	9 Ha	3 Ha	Kelapa Sawit
4	Kebun Dinas Di Kecamatan Kembang Janggut	2 Ha	1,5 Ha	Kelapa Sawit
Jumlah		46,6 Ha	17,5 Ha	

Sumber Data : Dinas Perkebunan (2018)

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2016 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tebel 2.3. 1. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2016 s/d 2018

No	Indikator Kinerja	Tar-get NSPK	Tar-get IKK	Tar-get Indi-kator Lain-nya	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Nilai LAKIP Dinas Perkebunan				Nilai LAKIP : CC	Nilai LAKIP : B	Nilai LAKIP : B	Nilai LAKIP : B	Nilai LAKIP : B	Nilai LAKIP : B	100.00%	100.00%	100.00%
2	Pertumbuhan Luas Areal Komoditi Perkebunan				Kebun Rakyat : 58.432 Ha	Kebun Rakyat : 59.965 Ha	Kebun Rakyat : 61.639 Ha	Kebun Rakyat : 60.921 Ha	Kebun Rakyat : 60.180 Ha	Kebun Rakyat : 60.180 Ha	104.26%	100.36%	97.63%
					PBS : 191.438 Ha	PBS : 211.927 Ha	PBS : 236.330 Ha	PBS : 178.946 Ha	PBS : 192.832 Ha	PBS : 192.832 Ha	93.47%	90.99%	81.59%
					Total : 249.870 Ha	Total : 271.892 Ha	Total : 297.969 Ha	Total : 239.867 Ha	Total : 253.012 Ha	Total : 253.012 Ha	96.00%	93.06%	84.91%
3	Cakupan Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan Modal Usaha				0	108 Pekebun	108 Pekebun	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkebunan				0	15 Km Jalan Produksi	10 Km Jalan produksi	0	0,63 Km Jalan Produksi	0	0.00%	4.20%	0.00%
					0	4 Unit sarana perke-bunan	6 Unit sarana perke-bunan	0	0 Unit sarana perke-bunan	0	0.00%	0.00%	0.00%

No	Indikator Kinerja	Tar-get NSPK	Tar-get IKK	Tar-get Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
5	Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pekebun				98,5	101,6	105,3	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Pertumbuhan Jumlah Petani Pekebun (KK)				Rakyat : 30.785 KK	Rakyat : 31.642 KK	Rakyat : 32.652 KK	Rakyat : 31.867 KK	Rakyat : 30.923 KK	Rakyat : 31.427 KK	108.21%	97.73%	96.88%
					Plasma : 16.873 KK	Plasma : 18.922 KK	Plasma : 21.362 KK	Plasma : 16.905 KK	Plasma : 16.305 KK	Plasma : 16.905 KK	100.19%	86.17%	76.19%
					Total : 47.658 KK	Total : 50.565 KK	Total : 54.015 KK	Total : 48,772 KK	Total : 47.228 KK	Total : 48.332 KK	105.37%	93.40%	88.89%
6	Pertumbuhan Produksi Komoditi Perkebunan				Sawit : - Rakyat : 285.000 Ton	Sawit : - Rakyat : 335.000 Ton	Sawit : - Rakyat : 375.000 Ton	Sawit : - Rakyat : 202.931 Ton	Sawit : - Rakyat : 222.030 Ton	Sawit : - Rakyat : 250.000 Ton	71.20%	66.28%	66.67%
					- PBS : 1.349.522 Ton	- PBS : 1.443.989 Ton	- PBS : 1.588.388 Ton	- PBS : 1.738.708 Ton	- PBS : 2.449.305 Ton	- PBS : 1.785.000 Ton	128.84%	169.62%	112.41%
					Karet : 10.000 Ton	Karet : 11.000 Ton	Karet : 12.500 Ton	Karet : 7.864 Ton	Karet : 17.598 Ton	Karet : 10.761 Ton	78.64%	159.98%	83.33%
					Lada : 4.800 Ton	Lada : 4.900 Ton	Lada : 5.050 Ton	Lada : 2.541 Ton	Lada : 3.587 Ton	Lada : 3.560 Ton	52.94%	73.20%	70.50%
					Kopi : 105 Ton	Kopi : 115 Ton	Kopi : 125 Ton	Kopi : 28 Ton	Kopi : 23 Ton	Kopi : 23 Ton	26.67%	20.00%	18.40%
					Kelapa : 8.100 Ton	Kelapa : 8.200 Ton	Kelapa : 8.300 Ton	Kelapa : 5.453 Ton	Kelapa : 7.327 Ton	Kelapa : 5.100 Ton	67.32%	89.35%	61.45%
					Kakao : 75 Ton	Kakao : 100 Ton	Kakao : 130 Ton	Kakao : 34 Ton	Kakao : 45 Ton	Kakao : 34 Ton	45.33%	45.00%	26.15%
					Aren : 300 Ton	Aren : 340 Ton	Aren : 400 Ton	Aren : 149 Ton	Aren : 265 Ton	Aren : 392 Ton	49.67%	77.94%	98.00%
					Total : 1.657.902 Ton	Total : 1.803.644 Ton	Total : 1.989.893 Ton	Total : 1.957.708 Ton	Total : 2.700.267 Ton	Total : 2.054.870 Ton	118.08%	149.71%	103.27%

No	Indikator Kinerja	Tar-get NSPK	Tar-get IKK	Tar-get Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
7	Persentase Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan				154,8 Ha	145 Ha	130 Ha	147,41 Ha	77,92 Ha	467,7 Ha	95.23%	53.74%	359.77%
8	Persentase Penurunan Komplik dan Gangguan Usaha Perkebunan				23 Kasus	21 Kasus	19 Kasus	11 Kasus	28 Kasus	13 Kasus	47.83%	133.33%	68.42%
9	Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan				Sawit : 18.100 Kg/Ha	Sawit : 18.700 Kg/Ha	Sawit : 19.300 Kg/Ha	Sawit : 12.988 Kg/Ha	Sawit : 14.700 Kg/Ha	Sawit : 3.819 Kg/Ha	71.76%	78.61%	19.79%
					Karet : 1.430 Kg/Ha	Karet : 1.470 Kg/Ha	Karet : 1.530 Kg/Ha	Karet : 1.071 Kg/Ha	Karet : 2.295 Kg/Ha	Karet : 888 Kg/Ha	74.90%	156.12%	58.04%
					Lada : 1.220 Kg/Ha	Lada : 1.260 Kg/Ha	Lada : 1.310 Kg/Ha	Lada : 633 Kg/Ha	Lada : 1.004 Kg/Ha	Lada : 1.135 Kg/Ha	51.89%	79.68%	86.64%
					Kopi : 350 Kg/Ha	Kopi : 360 Kg/Ha	Kopi : 375 Kg/Ha	Kopi : 220 Kg/Ha	Kopi : 419 Kg/Ha	Kopi : 306 Kg/Ha	62.86%	116.39%	81.60%
					Kelapa : 1.000 Kg/Ha	Kelapa : 1.060 Kg/Ha	Kelapa : 1.130 Kg/Ha	Kelapa : 875 Kg/Ha	Kelapa : 1.208 Kg/Ha	Kelapa : 1.125 Kg/Ha	87.50%	113.96%	99.56%
					Kakao : 1.195 Kg/Ha	Kakao : 1.205 Kg/Ha	Kakao : 1.220 Kg/Ha	Kakao : 620 Kg/Ha	Kakao : 848 Kg/Ha	Kakao : 577 Kg/Ha	51.88%	70.37%	47.30%
					Aren : 600 Kg/Ha	Aren : 780 Kg/Ha	Aren : 1.020 Kg/Ha	Aren : 895 Kg/Ha	Aren : 1.946 Kg/Ha	Aren : 1.040 Kg/Ha	149.17%	249.49%	101.96%

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
10	Pertumbuhan Nilai Produk Komoditi Perkebunan				Rp. 2.640.000.000.000	Rp. 2.960.000.000.000	Rp. 3.400.000.000.000	Rp. 2.822.208.602.299	Rp. 3.898.906.412.898	Rp. 3.298.582.042.417	106.90%	131.72%	97.00%

Sumber Data : Dinas Perkebunan (2018)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2016 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2. : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2016 s/d 2018

No	Program	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.019.644.867	2.065.860.487	2.061.586.818	2.762.307.978	1.947.470.444	1.948.749.621	91%	94%	95%		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	490.573.800	182.485.768	249.021.882	479.946.150	182.470.200	247.447.200	98%	99%	99%		
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.919.400	0	0	8.919.400	0	0	100%	0%	0%		
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	713.775.800	1.288.221.000	1.170.767.000	648.962.600	1.195.405.000	1.170.742.800	91%	93%	100%		

No	Program	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio Antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Ang-garan	Realisasi
6	Perluasan Komoditas Perkebunan	2.594.875.000	3.221.724.401	2.861.226.500	2.012.979.150	1.850.153.565	1.018.652.437	78%	57%	36%		
7	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	0	850.000.000	0	0	816.852.400	0	0%	96%	0%		
9	Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	120.170.000	50.000.000	0	120.170.000	0	0	100%	0%	0%		
10	Peningkatan Produksi Perkebunan	2.938.935.856	0	54.996.300	2,609.472.325	796.534.975	53.803.800	89%	99%	98%		
11	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	256.843.600	0	50.000.000	256.843.600	0	49.250.000	100%	0%	99%		
12	Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	0	50.000.000	50.000.000	0	0	49.935.000	0%	0%	99%		
13	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	96.526.550	50.000.000	53.111.700	96.526.550	46.996.800	52.131.700	100%	94%	98%		
14	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	200.000.000	800.000.000	0	190.514.000	0	0	95%	0%	0%		
Total		10.440.264.873	8.558.291.657	6.550.710.200	9.186.641.753	6.835.883.384	4.590.712.558	88%	80%	70%		

Sumber Data : Dinas Perkebunan (2018)

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN

Sebagai dinas teknis yang sebagian tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani perkebunan, Dinas Perkebunan harus focus pada pelayanan prima terhadap “konsumen”nya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah tantangan besar bagi Dinas Perkebunan untuk menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik. Melalui analisis SWOT (Strenght-Weakness-Oportunity-Treat), maka kondisi umum Dinas Perkebunan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Kekuatan yang dimiliki :
 - a. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur cukup memadai
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
 - c. Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan
 - d. Banyaknya jenis hasil perkebunan yang dihasilkan Kutai Kartanegara
2. Kelemahan yang dimiliki :
 - a. Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan
 - b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik
 - c. Data dan informasi perencanaan pembangunan perkebunan belum akurat
 - d. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah
3. Peluang yang dimiliki :
 - a. Tersedianya kompetensi tenaga kerja
 - b. Kondusifnya iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan
 - c. Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan
 - d. Banyaknya kesempatan kerjasama antar daerah, nasional dan internasional
4. Tantangan yang dimiliki :
 - a. Persaingan kualitas produk perkebunan
 - b. Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan
 - c. Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warning*
 - d. Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN

Perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat :
 - a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
 - b. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur.
 - c. Kurangnya tenaga penyuluh lapangan
 - d. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
 - f. Lemahnya Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder
 - g. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
 - h. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal.
2. Bidang Pengembangan Dan Perbenihan :
 - a. Alih fungsi usaha perkebunan, khususnya tanaman Kelapa Dalam, Ladadan Kakao ke tanaman Kelapa Sawit.
 - b. Bergesernya/terlambatnya masa tanam akibat perubahan dan ketidakpastian iklim.
 - c. Masih tingginya penggunaan benih ilegal (palsu).
 - d. Kurangnya tindak lanjut pasca pemberian bantuan saprodi (benih/pupuk/pestisida) ke kelompok tani.
 - e. Tingginya tingkat degradasi komoditas perkebunan unggulan, seperti : kakao, lada, kopi, dan kelapa dalam.
 - f. Rendahnya insentif terhadap Petani Pekebun
 - g. Rendahnya Varitas Unggul Lokal (sebagai Plasma Nutfah) Komoditas Perkebunan Aren, Kelapa Dalam dan Lada
3. Bidang Produksi :
 - a. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi pada komoditi perkebunan.
 - b. Kurangnya ketersediaan alat dan mesin untuk mendukung program-program inovatif.
 - c. Rendahnya SDM pada petani pekebun.

- d. Rendahnya penerapan teknologi perkebunan
 - e. Penurunan produktivitas produk perkebunan
 - f. Belum adanya demplot komoditi perkebunan organik.
 - g. Kurangnya intensifikasi pada kebun dinas.
 - h. Kurangnya kegiatan intensifikasi pada komoditi perkebunan rakyat.
4. Bidang Usaha Dan Penyuluhan :
- a. Rendahnya kualitas produk perkebunan
 - b. Minimnya pelaksanaan kemitraan pemasaran pada Perusahaan Besar Swasta (PBS).
 - c. Masih kurangnya upaya peningkatan komoditi hasil olahan komoditi perkebunan.
 - d. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
 - e. Tingginya tingkat permasalahan pada Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Plasma.
 - f. Tingginya kasus tumpang tindih peruntukan lahan
5. Bidang Perlindungan :
- a. Lemahnya pengendalian hama dan penyakit.
 - b. Lemahnya pengendalian lingkungan disekitar pabrik yg berbatasan dengan masyarakat.
 - c. Minimnya data kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Kerusakan dan perubahan lahan yang cukup tinggi.
 - e. Kurangnya tenaga/petugas pengamat organisme pengganggu tanaman di tingkat Kecamatan.
 - f. Belum adanya Regu Proteksi di Tingkat Kelompok Tani.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbang kompetensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak di capai dalam periode 2016–2021 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju,
Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”**

Penjabaran makna dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.
- BERKEADILAN**: Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat.
2. Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
3. Misi 3 : Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.
5. Misi 5 : Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.
6. Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Misi 7 : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka misi-misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat.
Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah lambatnya penyelesaian status asset pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidak sesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan sehingga ditetapkan menjadi komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur mengembangkan 5 dari 15 jenis komoditi unggulan, antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan lada. Sedangkan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mengembangkan 7 komoditi unggulan, yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, kopi, kakao dan aren.

Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Sasaran strategis tersebut, dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yang substansinya secara garis besar meliputi :

1. Kondisi umum yang meliputi kinerja pendanaan, makro dan mikro pembangunan perkebunan.
2. Potensi dan tantangan.
3. Arah kebijakan, sasaran strategis dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan.
4. Visi dan Misi dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan.
6. Prediksi kebutuhan investasi dan pendanaan APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan secara nasional, menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas Kementerian/Lembaga dalam membuka ruang solusi yang lebih lapang seiring dengan semakin luasnya tentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan perkebunan saat ini dan kedepan termasuk dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berimplikasi terhadap sub sektor perkebunan.

Dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 untuk mewujudkan sistem pertanian *bio-industry* berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu *“Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkuat fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”*.

Mengacu pada Misi Pembangunan Nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tahap III tahun 2015-2019 dan memperhatikan Misi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menetapkan Misi Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas, pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, memberikan pelayanan umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
2. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan.
3. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan, memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat, serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.
4. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim.
5. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan.
6. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain.
7. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada periode jangka menengah tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menetapkan tujuan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan.
2. Memberikan pelayanan berkualitas di bidang perencanaan, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyediaan data dan informasi.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, penyusunan rencana strategis SKPD dalam naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023 akan selalu berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023 agar terjadi keselarasan dalam pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu satuan kerja di subsektor perkebunan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur pada periode yang bersangkutan.

Berdasarkan Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2018-2023 adalah : ***“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat”***.

Setelah perumusan visi pembangunan di subsektor perkebunan, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Dinas Perkebunan dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati. Oleh sebab itu, dalam setiap peranan Dinas Perkebunan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yang jelas terutamadalam merealisasikan misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Saing Hasil Perkebunan Untuk Memenuhi Bahan Baku Industri Dan Menunjang Ekspor Nasional
2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembangunan Sektor Perkebunan Yang Berkelanjutan

Dalam pencapaian visi dan misinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah dan subsektor perkebunan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Berikut tujuan, sasaran, indikator & target kinerja Dinas Perkebunan dalam Rancangan Awal Renstra tahun 2018-2023 :

Tabel 3.3.1. : Tujuan, Sasaran, Indikator & Target Kinerja Rancangan Awal Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	Taget Kinerja Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan peran perkebunan dalam transformasi pembangunan Kalimantan Timur menuju Ekonomi Hijau							
1.	Meningkatnya produksi per kebun untuk menunjang perekonomian Kalimantan Timur	Persentase sub sektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	4,36 %	4,5%	5%	6%	7%	8%
2.	Terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (perusahaan)	38	43	48	53	58	63
3.	Meningkatkan kesejahteraan pekebun	NTP Pekebun	89,75	92	95	97	100	103

Sumber Data : Rancangan Awal Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan keruangan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Perencanaan pembangunan berbasis keruangan akan memperhatikan posisi *bergaining power* suatu kebijakan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang perlu diperhatikan untuk mengendalikan setiap prgoram kegiatan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah agar keberkanjutan ekosistem yang tertata dapat dijaga.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspke administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Perumusan dokumen perencanaan pembangunan masih perlu disinergikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan subsektor perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang selaras dengan isu-isu

lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang wilayah bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya. Selain itu, penerapan kajian lingkungan hidup tersebut dapat menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan berkelanjutan dengan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan strategis, perlu dianalisa keterkaitan antara kebijakan dengan pengendalian pengembangan suatu wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Analisis ini akan menghasilkan sebuah sinkronisasi awal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimana penataan ruang suatu wilayah akan menjadi pendukung pembangunan daerah.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sara yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya an jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

1. Rencana struktur wilayah kabupaten berfungsi :
 - a. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
 - b. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterakitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.
2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
 - a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
 - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
 - a. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 - b. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
 - c. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

- Memuat penempatan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
- d. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
- e. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Mengacu pada pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten (Permen PU No 16 Tahun 2009), Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, terdiri atas :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu :
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur menetapkan :

1. PKN berupa Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang;
2. PKL meliputi :
 - a. Perkotaan Kota Bangun;
 - b. Perkotaan Muara Badak;

- c. Perkotaan Muara Jawa;
 - d. Perkotaan Kembang Janggut;
 - e. Perkotaan Samboja; dan
 - f. Perkotaan Tenggarong Seberang.
3. PPK meliputi :
- a. Perkotaan Sanga-Sanga;
 - b. Perkotaan Loa Janan;
 - c. Perkotaan Loa Kulu;
 - d. Perkotaan Muara Muntai;
 - e. Perkotaan Muara Wis
 - f. Perkotaan Sebulu;
 - g. Perkotaan Anggana;
 - h. Perkotaan Marang Kayu;
 - i. Perkotaan Muara Kaman;
 - j. Perkotaan Kenohan; dan
 - k. Perkotaan Tabang.

Tabel 3.4.1. : Sistem dan Fungsi Perkotaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PUSAT KEGIATAN	LOKASI	FUNGSI
1.	PKN	Perkotaan - Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang	• Pusat Pengolahan Migas • Pusat Pengolahan Batu Bara • Pusat Pemerintahan Kabupaten • Pusat Perdagangan Regional • Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Regional • Pusat Pengembangan Perkebunan Sawit dan Pengolahan Hasil Sawit
2.	PKL	Kota Bangun	• Sebagai Pusat Pendukung Kegiatan PKN Tenggarong
		Muara Badak	• Sebagai Pusat Pendukung Kegiatan PKSN Samarinda
		Muara Jawa	• Sebagai Pusat Pendukung Kegiatan PKSN Samarinda dan PKN Balikpapan
		Kembang Janggut	• Sebagai Pusat Pendukung Kegiatan PKSN Long Pahangai

		Samboja	• Pusat Pelayanan Perkotaan • Pusat Transportasi Regional dan Lokal • Pusat Pengembangan Pertanian • Pusat Pelayanan Pariwisata • Pusat Pelayanan Industri, Jasa Perdagangan Terbatas
		Tenggarong Seberang	• Pusat Pelayanan Perkotaan • Pusat Transportasi Regional dan Lokal • Pusat Pengembangan Pertanian • Pusat Pelayanan Pariwisata • Pusat Pelayanan Industri, Jasa Perdagangan Terbatas
3.	PPK	• Sanga-Sanga • Loa Janan • Loa Kulu • Muara Muntai • Muara Wis • Sebulu • Anggana • Marang Kayu • Muara Kaman • Kenohan • Tabang	• Pusat Transportasi Antar Kecamatan dan/Lokal Kecamatan • Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian • Pusat Kegiatan Perikanan • Pusat Pengembangan Industri • Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan Lokal

Sumber Data : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033

Distribusi pemukiman perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan keberagaman yang tinggi yakni ada yang terpusat, terpancar, maupun berdekatan dengan pusat kota. Adapun rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menetapkan 1(satu) atau 3 (tiga) desa yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan bagi desa sekitarnya dengan fungsi pelayanan kegiatan antar lingkungan dan antar desa.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara Geografis terletak di daerah Khatulistiwa dengan posisi antara 115° 26' 28" BT dan 1° 08' 06" LS, secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kutai Timur serta Kota Samarinda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Luas Wilayah 27.263,10 Km² atau 13,28 % dari luas Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 227 Desa / Kelurahan.

Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Tenggarong dan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu maka Wilayah Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi atas 3 (tiga) wilayah pembangunan terpadu (WPT) yaitu :

1. **Wilayah I (Pesisir)** terdiri dari Kecamatan : Samboja, Muara Jawa, Sanga sanga, Anggana, Muara Badak, dan Marang Kayu dengan Pusat Pelayanan berada di Kecamatan Muara Jawa dan Muara Badak.
2. **Wilayah II (Tengah)** terdiri dari Kecamatan : Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara kaman dengan Pusat Pelayanan berada di Tenggarong.
3. **Wilayah III (Hulu)** terdiri dari Kecamatan : Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, Kembang Janggut dan Tabang dengan pusat Pelayanan berada di Kota bangun.

Sebagian Besar Topografi wilayah bergelombang dengan ketinggian tempat antara 25-500 m dpl, dengan dominasi jenis tanah aluvial dan podsolik merah kuning.

Pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan dari program dan kegiatan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Keberhasilan yang dicapai selama ini terlihat dari semakin berkembangnya luas areal produksi perkebunan serta kelompok tani yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten dengan komoditi andalan Kelapa Sawit, Karet, Lada, dan Kelapa serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Adapun pengembangan komoditi unggulan tanaman perkebunan dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Unggulan Ekonomi (KUE) meliputi :

1. Tanaman Kelapa Sawit dengan sebaran pada wilayah :
 - a. Kecamatan Kota Bangun
 - b. Kecamatan Loa Kulu
 - c. Kecamatan Muara Badak
 - d. Kecamatan Marang Kayu
 - e. Kecamatan Tenggarong
 - f. Kecamatan Sebulu

- g. Kecamatan Muara Jawa
 - h. Kecamatan Samboja
 - i. Kecamatan Loa Janan
 - j. Kecamatan Kembang Janggut
 - k. Kecamatan Tabang
2. Tanaman Karet dengan sebaran pada wilayah :
- a. Kecamatan Marang Kayu
 - b. Kecamatan Muara Badak
 - c. Kecamatan Samboja
 - d. Kecamatan Loa Janan
 - e. Kecamatan Muara Jawa
 - f. Kecamatan Kota Bangun
3. Tanaman Lada dengan sebaran pada wilayah :
- a. Kecamatan Loa Janan
 - b. Kecamatan Samboja
 - c. Kecamatan Muara Badak
4. Tanaman Kelapa Dalam dengan sebaran pada wilayah :
- a. Kecamatan Samboja
 - b. Kecamatan Muara Jawa
 - c. Kecamatan Marang Kayu
5. Tanaman Kopi dengan sebaran pada wilayah :
- a. Kecamatan Muara Jawa
 - b. Kecamatan Samboja
6. Tanaman Kakao dengan sebaran pada wilayah :
- a. Kecamatan Muara Kaman
 - b. Kecamatan Kembang Janggut
7. Tanaman Arendengan sebaran pada wilayah :
- a. Kecamatan Muara Kaman
 - b. KecamatanLoa Janan
 - c. KecamatanKota Bangun

Selaras dengan visi dan misi dari Gerbang Raja, Pembangunan Perkebunan yang mengarah kepada kelanjutan dan peningkatan pembangunan pemberdayaan seluruh komponen yang ada dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam secara lestari dan

berkelanjutan untuk memperhatikan dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan rakyat pedesaan. Merupakan kelompok masyarakat yang wajib mendapat prioritas untuk diberdayakan dan dimandirikan secara ekonomi maupun sosial menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

3.4.2. Telaahan Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah kabupaten pada dasarnya merupakan rencanan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai :

- 1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegaitan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dan wilayah kabupaten;
- 2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka panjang menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- 4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

- Rencana pola ruang untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dirumuskan berdasarkan kriteria :
- 1. Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Nasional, yang tertuang dalam PP No. 26 Tahun 2008;
 - 2. Merujuk pada rencana pola yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031;
 - 3. Mengakomodasikan kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
 - 4. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 - 5. Mempertimbangkan hasil dari analisis kesesuaian lahan untuk fungsi lindung sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.
 - 6. Mengacu pada klasifikasi pada ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, seperti yang disarikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.2. : Klasifikasi Pola Ruang Wilayah Kabupaten

NO	Klasifikasi Kawasan	Perincian Kawasan
A. Kawasan Lindung		
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.	• Kawasan Hutan Lindung • Kawasan Resapan Air • Kawasan Bergambut

2.	Kawasan perlindungan setempat.	• Sempadan Pantai • Sempadan Sungai • Kawasan Sekitar Danau atau Waduk • Kawasan Sekitar Mata Air • Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal Lainnya • Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
3.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya,	• Suaka Alam • Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya • Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut • Cagar Alam dan Cagar Alam Laut • Kawasan Pantai Berhutan Bakau • Taman Nasional dan Taman Nasional Laut • Taman Hutan Raya • Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut • Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
4.	Kawasan rawan bencana alam	• Kawasan Rawan Tanah Longsor • Kawasan Rawan Gelombang Pasang • Kawasan Rawan Banjir
5.	Kawasan Lindung Geologi	• Kawasan Cagar Alam Geologi • Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi • Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah
6.	Kawasan Lindung Lainnya	• Cagar Biosfer, Ramsar, dan Taman Buru • Kawasan Perlindungan Plasma-Nuflora • Kawasan Pengungsian Satwa • Terumbu Karang • Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi

B. Kawasan Budidaya		
1.	Kawasan peruntukan hutan produksi	• Hutan Produksi Terbatas (HPT) • Hutan Produksi Tetap (HP) • Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
2.	Kawasan hutan rakyat	
3.	Kawasan peruntukan pertanian	• Kawasan Pertanian Lahan Basah • Kawasan Pertanian Lahan Kering • Kawasan Hortikultura • Kawasan Perkebunan • Kawasan Perternakan
4.	Kawasan peruntukan perikanan	• Kawasan Perikanan Tangkap • Kawasan Budidaya Perikanan • Kawasan Pengolahan Ikan
5.	Kawasan peruntukan pertambangan	• Kawasan Mineral dan Batubara • Kawasan Minyak dan Gas Bumi • Kawasan Panas Bumi, serta Air Tanah di Kawasan Pertambangan
6.	Kawasan peruntukan industri	• Industri Besar • Industri Menengah • Industri Kecil dan Mikro
7.	Kawasan peruntukan pariwisata	• Kawasan Budaya • Kawasan Alam • Kawasan Buatan
8.	Kawasan peruntukan permukiman	• Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan
9.	Kawasan peruntukan lainnya	• Kawasan HANKAM • Kawasan Lainnya.

Sumber Data : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan utama di sektor perkebunan tersebut, isu-isu strategis dan mendasar yang harus tertangani dalam periode 2016-2021 untuk menunjang terciptanya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan adalah :

1. Lemahnya tatakelola pemerintahan dan profesionalisme aparatur.
2. Akuntabilitas kinerja pemerintah yang belum optimal.
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani pekebun.
4. Tingginya tingkat degradasi komoditas perkebunan unggulan, seperti : kakao, lada, kopi, dan kelapa dalam.
5. Daya dukung Infrastruktur sektor perkebunan yang masih kurang.
6. Dampak negatif atas perubahan iklim pada sektor agro.
7. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah.
8. Lemahnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan.
9. Pemanfaatan potensi sumber daya alam terbaharukan belum optimal.

Dinas Perkebunan yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan perkebunan. Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT (*strength-weakness-opportunities-threats*).

3.5.1. Analisis Lingkungan Internal

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan maupun kelemahan, antara lain meliputi :

Kekuatan :

- a. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur cukup memadai
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- c. Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan
- d. Banyaknya jenis hasil perkebunan yang dihasilkan Kutai Kartanegara

Kelemahan :

- a. Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan
- b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik
- c. Data dan informasi perencanaan pembangunan perkebunan belum akurat
- d. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah

Selain itu terdapat faktor-faktor strategis lainnya diantaranya : (1) Tersedianya anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai; (2) Hasil perkebunan Kutai Kartanegaramemiliki standar mutu yang baik; (3) Koordinasi lintas bidang pada SKPD belum optimal; (4) Penegakan dan kepastian hukum belum sepenuhnya diterapkan; (5) Belum berkembangnya inovasi produk perkebunan; dan (6) Terjadinya penurunan produktivitas produk perkebunan.

3.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang ataupun ancaman adalah :

Peluang :

- a. Tersedianya kompetensi tenaga kerja
- b. Kondusifnya Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan
- c. Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan
- d. Banyaknya kesempatan kerjasama antardaerah, nasional dan internasional

Tantangan :

- a. Persaingan kualitas produk perkebunan
- b. Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan
- c. Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warning*
- d. Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas

Selain itu terdapat faktor-faktor strategis lainnya diantaranya : (1) Potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif; (2) Konsistensi kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan; (3) Adanya dukungan yang besar terhadap pengembangan perkebunan; (4) Kebutuhan hasil perkebunan masyarakat cukup tinggi; (5) Kurangnya persatuan antar petani pekebun; dan (6) Terjadinya tumpang tindih lahan yang memicu munculnya konflik di masyarakat.

Tabel 3.5.1. : Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFAS) Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
	Kekuatan			
1.	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur cukup memadai	0,4	4	1,6
2.	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	0,3	3	0,9
3.	Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan	0,2	3	0,6
4.	Banyaknya jenis hasil perkebunan yang dihasilkan Kutai Kartanegara	0,1	3	0,3
	Jumlah	1,00		3,4

	Kelemahan			
1.	Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan	0,1	4	0,4
2.	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik	0,4	2	0,8
3.	Data dan informasi perencanaan pembangunan perkebunan belum akurat	0,2	4	0,8
4.	Penerapan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah	0,3	3	0,9
Jumlah		1,00		2,9

Sumber Data : Hasil Analisis (2018)

Nilai matriks evaluasi internal : Total Kekuatan - Total Kelemahan = 3,4 - 2,9 = 0,5.

Tabel 3.5.2. : Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFAS) Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang				
1.	Tersedianya kompetensi tenaga kerja	0,3	3	0,9
2.	Kondusifnya Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan	0,2	3	0,6
3.	Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan	0,4	4	1,6
4.	Banyaknya kesempatan kerjasama antar daerah, nasional dan internasional	0,1	3	0,3
Jumlah		1,00		3,4
Tantangan				
1.	Persaingan kualitas produk perkebunan	0,3	3	0,9
2.	Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan	0,4	3	1,2
3.	Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari <i>global warning</i>	0,2	3	0,6
4.	Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas	0,1	3	0,3
Jumlah		1,00		3,0

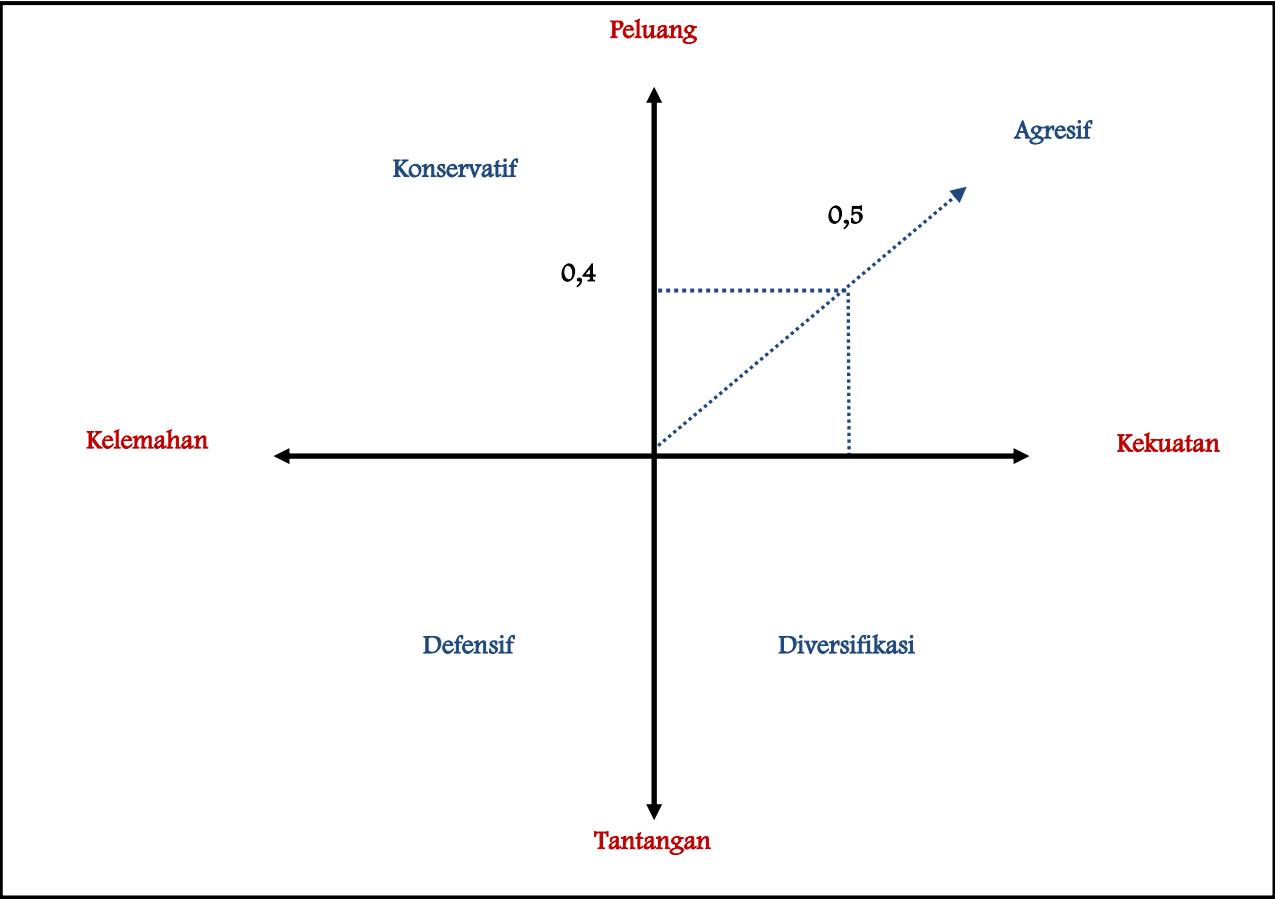
Sumber: Hasil Analisis (2018)

Nilai matriks evaluasi eksternal : Total Peluang - Total Ancaman = 3,4 - 3,0 = 0,4

Profil Strategi Peningkatan Pembangunan Perkebunan didapat dari nilai evaluasi faktor internal dan eksternal. Nilai pada sumbu X (faktor internal) didapat dari selisih antara nilai kekuatan dan kelemahan dalam Matriks Evaluasi Faktor Internal (*IFE Matrix*), sedangkan nilai sumbu Y (faktor eksternal) merupakan selisih dari nilai-nilai peluang dan ancaman pada Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (*EFE Matrix*). Profil strategi peningkatan pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada Gambar 3.1. di bawah ini.

Berdasarkan hasil analisis profil menunjukkan bahwa *stakeholders* di wilayah studi dalam melakukan peningkatan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada di kuadran agresif, dimana *stakeholders* berada dalam posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya dalam rangka memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan-kelemahan internal dan untuk mengatasi berbagai ancaman eksternal.

Gambar 3.1. : Profil Strategi Peningkatan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara



- Kuadran 1 : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).
- Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi.
- Kuadran 3: Menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di lain pihak menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.
- Kuadran 4 : Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Pengaturan dalam pengelompokan faktor-faktor internal dan eksternal di atas, selanjutnya dirumuskan strategi-strategi yang dikelompokkan menjadi :

1. Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Kesempatan (S-O).
2. Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Kesempatan (W-O).
3. Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman (S-T); dan
4. Strategi Mengurangi Kelemahan untuk Menghadapi Ancaman (W-T).

Strategi-strategi yang dirumuskan dalam analisis SWOT secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

1. **Strategi S-O (memaksimalkan kekuatan dan menangkap peluang) :**
 - a. Pengembangan kapasitas dan ketahanan SDM dan kelembagaan untuk keberlanjutan usaha perkebunan.
 - b. Penguatan kemitraan dan kerjasama antar *stakeholders* dalam pembangunan perkebunan.
2. **Strategi S-T (memaksimalkan kekuatan dengan menghindari ancaman) :**
 - a. Penyusunan kebijakan dan regulasi daerah untuk pengelolaan sumberdaya perkebunan yang berorientasi kesejahteraan dan kemandirian.
 - b. Peningkatan inovasi iptek perkebunan untuk peningkatan daya saing.
3. **Strategi W-O (meminimalkan kelemahan dan menangkap peluang) :**
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perkebunan secara partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana dan petugas profesional perkebunan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan.
4. **Strategi W-T (meminimalkan kelemahan untuk menghindari tantangan) :**
 - a. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum untuk pembangunan perkebunan yang transparan dan akuntabel.
 - b. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan.

Tabel 3.5.3. : Analisis SWOT untuk Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Eksternal	KEKUATAN / <i>Strength</i> (S)	KELEMAHAN / <i>Weakness</i> (W)
	1. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur cukup memadai. 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 3. Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan. 4. Banyaknya jenis hasil perkebunan yang dihasilkan Kutai Kartanegara.	1. Terbatasnya tenaga penyuluh lapangan. 2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik. 3. Data dan informasi perencanaan pembangunan perkebunan belum akurat. 4. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah.
PELUANG / <i>Opportunities</i> (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S-O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG (W-O)
1. Tersedianya kompetensi tenaga kerja. 2. Kondusifnya iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan. 3. Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan. 4. Banyaknya kesempatan kerjasama antardaerah, nasional dan internasional.	1. Pengembangan kapasitas dan ketahanan SDM dan kelembagaan untuk keberlanjutan usaha perkebunan. 2. Penguatan kemitraan dan kerjasama antar <i>stakeholders</i> dalam pembangunan perkebunan.	1. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perkebunan secara partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan 2. Peningkatan sarana dan prasarana dan petugas profesional perkebunan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan.
TANTANGAN / <i>Threat</i> (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN (S-T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN (W-T)
1. Persaingan kualitas produk perkebunan. 2. Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan. 3. Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari <i>global warning</i> . 4. Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas.	1. Penyusunan kebijakan dan regulasi daerah untuk pengelolaan sumberdaya perkebunan yang berorientasi kesejahteraan dan kemandirian. 2. Peningkatan inovasi iptek perkebunan untuk peningkatan daya saing.	1. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum untuk pembangunan perkebunan yang transparan dan akuntabel. 2. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan.

Sumber Data : Hasil Analisis (2018)

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERKEBUNAN

Tujuan mengindikasikan target yang ingin dicapai dalam jangka menengah biasanya 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah target yang ingin dicapai 1 tahun yang hasilnya dapat diuji/diukur lewat program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-1, Misi ke-2 dan Misi ke-4, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel. 4.6.1. : Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja					
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	65	68	72	76	81
2	Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,57%	7,65%	7,46%	6,87%	6,63%
	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	0%	0%	5%	5%	5%
3	Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	5,52%	6,64%	6,92%	7,06%	7,16%
	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	8,68%	9,03%	9,39%	9,76%	10,15%

Sumber Data : Hasil Analisis (2018)

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1. : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan			
Misi I : Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Pemantapan Penyelenggaran Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana dan Disiplin Aparatur, serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan
Misi II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2 : Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Pemantapan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan

Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Pertanian Dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3 : Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Peningkatan Luas Areal Perkebunan	Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan, Pengembangan Areal Perkebunan dan Kebun Dinas, Pembibitan Tanaman Perkebunan, serta Kemitraan Usaha Perkebunan (Plasma)
		Peningkatan Produksi Perkebunan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi, Pengadaan Alat dan Mesin, Pengembangan Teknologi dan Budidaya Perkebunan, Rehab/Peremajaan Tanaman Perkebunan, Dukungan Perlindungan Perkebunan, Pembinaan Usaha Perkebunan, serta Penyuluhan Perkebunan
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Dukungan Pemasaran Hasil Perkebunan & Penyediaan Informasi Harga Pasar Hasil Komoditas Perkebunan

Sumber Data : Hasil Analisis (2018)

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah subsektor perkebunan kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra maupun pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan subsektor perkebunan harus diturunkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global, dalam hal ini sasaran Perubahan Renstra Dinas Perkebunan.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan pelaksanaan atas kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, masing-masing program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan subsektor perkebunan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dirumuskan program-program prioritas sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1. : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja															Bupati/ Kadisbun	Tujuan
1.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai	63	65		68		72		76		81		81		Kadisbun	Sasaran
1.1.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1,947	100	1,949	100	2,749	100	2,919	10000%	2,919	10000%	12,483	Sekretaris	
1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon		972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	864 Rek per tahun (25 rekening telepon, 22 rekening air dan 25 rekening listrik)	369	780 Rek per tahun (11 Rek Telepon, 21 Rek air, 22 Rek listrik, 11 TV Kabel)	218	924 Rek per tahun (24 Rek Listrik, 21 Rek Air, 21 Rek Telpon, 11 TV Kabel)	436	972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	262	972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	262	5.484 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	1,546	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor		15 Jenis	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	15 Jenis	-	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		176 Unit Roda 2 & 16 Unit Roda 4	65 unit roda 2 dan 16 unit roda 4	39	140 unit roda 2 dan 14 unit roda 4	39	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	54	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	55	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	55	768 Unit Roda 2 & 88 Unit Roda 4	242	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan/Orang		1.009 Unit	10 orang/bulan	60	252 orang	208	313 Orang	244	-	-	-	-	1.584 Orang	512	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun
1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan		94 Jenis	38 jenis	149	25 Jenis	150	40 Jenis	166	39 Jenis	180	39 Jenis	180	297 Jenis	826	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		8 Jenis	8 jenis	63	4 jenis	34	3 Jenis	73	6 Jenis	55	6 Jenis	55	35 Jenis	280	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun
1.1.1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		14 Jenis	0	-	0	-	0	-	14 Jenis	15	14 Jenis	15	42 Jenis	30	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1.1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		18.360 eksemplar	0	-	0	-	10.800 Eksemplar	43	5.014 Eksemplar	25	5.014 Eksemplar	25	50.960 Jenis	93	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan		27 Jenis	0	-	0	-	0	-	30 Jenis	25	30 Jenis	25	87 Jenis	50	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman		7.300 Porsi	2360 Kotak	61	5.365 kotak, 1.924 kemasan & 50 dus	112	5.745 porsi, 156 dus	150	5.014 Kotak, 122 Dos	129	5.014 Kotak, 122 Dos	129	32.260 Porsi, 518 dus	581	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Tenggarong
1.1.1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah		600 Orang/Hari	288 orang/hari	354	314 OH	368	600 Orang/Hari	468	600 Orang/Hari	900	600 Orang/Hari	900	2.702 Orang/Hari	2,990	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Dalam dan Luar Daerah
1.1.1.12	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor		122 orang	78 orang	854	78 orang	819	80 orang	860	74 orang	786	74 orang	786	518 orang	4,105	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki		0	0	-	0	-	6 Jenis	55	10 Jenis	60	10 Jenis	60	26 Jenis	175	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		83 Unit	0	-	0	-	40 Jenis	200	13 Jenis	175	13 Jenis	175	139 Jenis	550	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.1.15	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan		0	0	-	0	-	0	-	36 Unit	252	36 Unit	252	72 Unit	504	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun
1.1.1.16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai		1.925 lembar	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.925 lembar	-	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun
1.1.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	60	65	182	70	247	75	385	80	847	85	847	85	2,510	Sekretaris	
1.1.2.1	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan		200 Set	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		24 Bangunan	1 bangunan	11	6 bangunan (441 M2)	90	2 Bangunan	115	4 Bangunan	169	4 Bangunan	169	17 Bangunan	554	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.2.3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		16 Unit Roda 4, 80 Unit Roda 2 dan 1 Unit Ganset	17 unit roda 4	172	14 unit roda 4	158	14 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2	190	14 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	403	14 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	403	89 Unit Roda 4, 140 Unit Roda 2 dan 1 Unit Ganset	1,325	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.2.4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		3 Bangunan	0	-	0	-	1 Bangunan	80	1 Bangunan	276	1 Bangunan	276	8 Bangunan	632	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.2.5	Pembangunan Gedung Kantor UPTD	Jumlah gedung kantor yang dibangun		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Tenggarong
1.1.2.6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan		4 Unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1.2.7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat		1 Rumah Dinas	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Tenggarong
1.1.3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	-	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	
1.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		1.760 Stel	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Subbag. Kepegawaian	Disbun dan UPTD
1.1.3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Subbag. Kepegawaian	Disbun dan UPTD
1.1.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	Nilai	84.96	85.01	-	85	-	86	100	87	570	88	570	88	1,240	Sekretaris	
1.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal		0	0	-	0	-	0	-	35 Orang	500	35 Orang	500	70 Pegawai	1,000	Subbag. Kepegawaian	Tenggarong dan kota lainnya
1.1.4.2	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah (Fasilitasi Tim Bekias RB)	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi		0	0	-	0	-	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	70	1 Kegiatan	70	3 Kegiatan	240	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD
1.1.4.3	Bimbingan Teknis Pegawai	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Teknis		81 Pegawai	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	81 Pegawai	-	Subbag. Kepegawaian	Tenggarong dan kota lainnya
1.1.4.4	Sosialisasi Manajemen Perubahan SKPD	Jumlah UPTD yang mendapat sosialisasi		6 UPTD (K. Bangun, M. Wis, Sebulu, M. Kaman, Samboja, M. Jawa)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 UPTD (K. Bangun, M. Wis, Sebulu, M. Kaman, Samboja, M. Jawa)	-	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	18 UPTD
1.1.5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	Persen	75	80	1,195	85	1,171	90	503	95	1,101	100	1,301	100	5,272	Sekretaris	
		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
1.1.5.1	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan (Laporan Keuangan & SPIP)		0	0	-	0	-	3 Laporan Keuangan dan 1 Laporan Aset BMD	33	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	34	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	34	9 Laporan Keuangan, 2 SPIP dan 1 Laporan Aset BMD	101	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1.5.2	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen (Renja, RKA/ DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Lap. Tahunan)		0	0	-	0	-	5 Dokumen (Renja, RKA/ DPA, LKjIP, LPPD & Monev)	275	6 Dokumen (Renja, RKA/ DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	409	6 Dokumen (Renja, RKA/ DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	409	17 Dokumen (Renja, RKA/ DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	1,094	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Dalam & Luar Daerah
1.1.5.3	Penyusunan Renstra SKPD (Penyusunan Dokumen Renstra)	Jumlah Dokumen (Renstra)		1 Dokumen Renstra	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen (Renstra)	200	2 Dokumen Renstra	200	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Kab. Kukar
1.1.5.4	Penyusunan Data Dan Informasi	Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)		0	0	-	0	-	4 Dokumen (Statistik, Lap. Tahunan, SIPD, PPID)	195	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Laporan Tahunan, Panji Perkebunan)	235	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Laporan Tahunan, Panji Perkebunan)	235	12 Dokumen (Statistik, SIPD, Laporan Tahunan, Panji Perkebunan)	666	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Dalam & Luar Daerah
1.1.5.5	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah (Inventarisasi Barang Milik Daerah)	Jumlah Dokumen (Barang Milik Daerah)		1 Dokumen Aset BMD	0	-	18 Kecamatan (1 Dokumen Aset BMD)	50	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen Aset BMD	50	Subbag. Umum & Ketatalaksanaan	Disbun dan UPTD
1.1.5.6	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Websit		1 Sistem	0	-	0	-	0	-	1 Kegiatan	37	1 Kegiatan	37	2 Kegiatan	74	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD
1.1.5.7	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah		0	0	-	0	-	0	-	356 Orang	325	356 Orang	325	712 Orang	650	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD
1.1.5.8	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa pengelola barang milik daerah		0	0	-	0	-	0	-	72 Orang	60	72 Orang	60	144 Orang	120	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD
1.1.5.9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan, Capaian Kinerja dan Monev		6 Dokumen (Renja, RKA/ DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)	0	-	6 dokumen (Renja, RKA/ DPA, LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan dan Monev)	50	0	-	0	-	0	-	12 Dokumen (Renja, RKA/ DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)	50	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD
1.1.5.10	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan untuk Pembayaran Hutang Pihak Ketiga		0	2 Kegiatan	1,195	1 kegiatan	1,071	0	-	0	-	0	-	3 kegiatan	2,266	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD
1.1.5.11	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan		3 Laporan Keuangan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 Laporan Keuangan	-	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1.5.12	Pengembangan Data Base Perkebunan Dan Kehutanan	Data dan Peta Sebaran		1 Dokumen Data Base	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen Data Base	-	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	18 Kecamatan
1.1.5.13	Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Dan Kehutanan	Jumlah aparatur yang mengikuti sinkronisasi data statistik		30 Petugas Statistik	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30 Petugas Statistik	-	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	Disbun dan UPTD
2	Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	0%	7,57		7,65		7,46		6,87		6,63		6,63		Bupati/ Kadis bun	Tujuan
2.1	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	Persen	0%	0%		0%		500%		500%		500%		1500%		Kadisbun	Sasaran
2.1.1	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan	Orang Pekebu n	0	0	-	0	-	72	1,220	12	393	14	699	98	2,312	Bidang Pengembanga n dan Perbenihan & Bidang Produksi	
2.1.1.1	Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi		0	0		0		72 Orang Pekebun (72 Ha) : 12 Kel. Tani, 10.800 Bibit Sawit, 10.800 Kg Pupuk, 432 Ltr Herbisida, 72 Bh Hand Sprayer & 12 Bh Papan Nama	1,220	12 Orang Pekebun	393	14 Orang Pekebun	482	156 Orang Pekebun	2,096	Seksi Pengembangan Areal	12 Kecamatan (Loa Kulu, Loa Janan, Muara Kaman, Sebulu, Marangkayu, Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang)
2.1.1.2	Intensifikasi Pada Kelompok Tani Pekebun Miskin	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Intensifikasi		0	0		0		0		0		12 Orang Pekebun	216	12 Orang Pekebun	216	Seksi Sarana dan Prasarana	12 Kecamatan
3	Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	2,31	5,52		6,64		6,92		7,06		7,16		7,16		Bupati/ Kadis bun	Tujuan
3.1	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	8,67	8,68		9,03		9,39		9,76		10,15	1,622	10,15		Kadisbun	Sasaran

55
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.1.3	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat		485 Ha	0		11 Ha	167	210 Ha	1,184	0		25 Ha	501	1.126 Ha	1,851	Seksi Pengembangan Areal	18 Kecamatan
				Bibit 266.750 Pohon			Bibit 5.500 Pohon		Bibit 40.000 Pohon									
				Pupuk Kimia 48.500 Kg			Pupuk Kimia 2.200 Kg		Pupuk Kimia 9.600 Kg									
				Herbisida 1.940 Ltr			Herbisida 88 Ltr		Herbisida 480 Ltr									
				Hand Sprayer 485 Unit			Hand Sprayer 11 Unit											
3.1.1.4	Perluasan Komoditi Perkebunan, Pengembangan Tanaman Karet Rakyat (Bankeu)	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat		0	55 Ha	654	0		0		0		0		55 Ha	654	Seksi Pengembangan Areal	Tenggarong Seberang, Loa Janan, Sanga sanga, Muara Muntai
					27.500 bibit kelapa sawit													
					Pupuk Kimia 5.500 Kg													
					Herbisida 330 Ltr													
					Hand Sprayer 55 Unit													
3.1.1.5	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	Jumlah Kelompok Penangkar/produsen benih yang dibina dan lokasi pengawasan		18 Lokasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	18 Lokasi	-	Seksi Perbenihan	18 Kecamatan
3.1.1.6	Pengembangan Tanaman Lada Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat		0	0		4,60 Ha	215	7 Ha	225	0		10 Ha	355	311,60 Ha	795	Seksi Pengembangan Areal	Loa Janan, Samboja, Muara Badak
							Bibit 8.400 Stek		Bibit 14.000 Stek									
							Pupuk Kimia 644 Kg		Pupuk Kimia 1.400 Kg									
							Herbisida 17 Ltr		Herbisida 42 Ltr									
							Turus 7.800 Btg											

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.1.7	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat		0	0		0		20 Ha	622	18 Ha	473	18 Ha	473	120 Ha	1,568	Seksi Pengembangan Areal	Sebulu, Anggana, Loa Kulu, Kenohan, Samboja, M. Jawa, Loa Janan, Muara Kaman
								Bibit 24.200 Pohon										
								Pupuk Kimia 1.500 Kg										
								Herbisida 120 Ltr										
3.1.1.8	Pengembangan Tanaman Aren Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Aren Rakyat		0	0		0		0		0		50 Ha		100 Ha	-	Seksi Pengembangan Areal	Tenggarong, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan
												Bibit 4.000 Pohon						
												Pupuk Organik 12.000 Kg						
												Agensia Hayati 12.000 Kg						
												Hand Sprayer 20 Unit						
3.1.1.9	Identifikasi Penilaian Blok Penghasil Tinggi (BFT) Tanaman Aren dan Pohon Induk Terpilih (PTT)	Jumlah Lokasi		0	0		0		2 Lokasi (Kenohan & Kota Bangun)	125	0		0		2 Lokasi (Kenohan & Kota Bangun)	125	Seksi Perbenihan	Kenohan & Kota Bangun
3.1.1.10	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah Lokasi									3 Lokasi, Loa Janan, Muara Badak (Lada) & Kenohan (Aren)	250	2 Lokasi, di Kecamatan Kembang Janggut & Loa Kulu (Kakao)	125	6 Lokasi	375	Seksi Perbenihan	Loa Kulu, Sebulu, Loa Janan, Muara Badak & Kembang Janggut
3.1.1.11	Pengembangan Komoditi Kebun Dinas	Luas komoditi kebun dinas yang dikembangkan		0	0		0		4 Ha (Kopi 2 Ha, Aren 1 Ha & Kelapa Sawit 1 Ha)	225	4 Ha (Aren 1 Ha, Kelapa Sawit 2 Ha & Kelapa Kopyor 1 Ha)	250	4 Ha (Aren 1 Ha, Kelapa Sawit 2 Ha & Kelapa Kopyor 1 Ha)	225	12 Ha (Kopi 2 Ha, Aren 3 Ha, Kelapa Sawit 5 Ha & Kelapa Kopyor 2 Ha)	700	Seksi Pengembangan Areal	Tenggarong & Loa Kulu
3.1.1.12	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	Jumlah Dokumen		0	0		0		2 Dokumen (Kebun Dinas & Komoditi Aren)	100	1 Dokumen (Karet & Lada)	300	1 Dokumen	300	4 Dokumen	699	Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan	18 Kecamatan
3.1.1.13	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)		0	0		0		50.000 Benih, 1 Unit Gudang, 1 Unit Rumah Jaga & 1 Paket Pagar Keliling)	2,275	34.000 benih	430	34.000 benih	430	102.000 Benih, 1 Unit Gudang, 1 Unit Rumah Jaga, 1 Rumah Pompa & 1 Paket Pagar Keliling	3,135	UPTD Perbenihan Kebun Dinas Dan Pengolahan Hasil	Tenggarong & Kembang Janggut

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.1.14	Pembebasan Lahan untuk Penyaluran Bibit untuk UPT. Dinas Perkebunan Kecamatan Kembang Janggut (Bankeu)	Jumlah Luas Lahan Pembibitan Tanaman Perkebunan		0	0		2 Ha	637	3 Ha	1,000	0		0		5 Ha	1,637	UPTD Perbenihan Kebun Dinas Dan Pengolahan Hasil	Kembang Janggut
3.1.1.15	Lanjutan Pembebasan Lahan Penyaluran Bibit UPT Dinas Perkebunan Kec. Kembang Janggut	Jumlah Sertifikat, Jembatan Penyeberangan & Turap Lahan Pembibitan Tanaman Perkebunan		0	0		0		2 Buah Sertifikat, 2 Buah Jembatan Penyeberangan & 2 Paket Turap	350	0		0		2 Buah Sertifikat, 2 Buah Jembatan Penyeberangan & 2 Paket Turap	350	UPTD Perbenihan Kebun Dinas Dan Pengolahan Hasil	Kembang Janggut
3.1.1.16	Pembinaan dan Evaluasi	Jumlah Kerjasama		0	0		0		0		0		0		0		Seksi Pembinaan	18 Kecamatan
3.1.2	Peningkatan Produksi Perkebunan	1) Produksi Komoditi Perkebunan : 1. Sawit Rakyat 2. Sawit PBS 3. Karet Rakyat 4. Karet PBS 5. Lada 6. Kelapa 7. Kopi 8. Kakao 9. Aren 2) PAD Kebun Dinas Perkebunan :	1) Ton 2) Rp	1. 202931 2. 1738708 3. 7098 4. 766 5. 2541 6. 5452 7. 28 8. 34 9. 148 0,-	1. 241200 2. 1745000 3. 8165 4. 766 5. 2633 6. 4743 7. 23 8. 45 9. 263 0,-	797 0,-	54 0,-	1. 270000 2. 1856000 3. 11200 4. 750 5. 3870 6. 5500 7. 28 8. 45 9. 470 0,-	3,681 415000000	10,034 460000000	9,406 875000000	1. 320000 2. 2230859 3. 14000 4. 726 5. 4389 6. 6000 7. 38 8. 67 9. 764 460000000	1. 1574131 2. 11312461 3. 62863 4. 4510 5. 21163 6. 32595 7. 173 8. 236 9. 2625 875000000	23,970 875000000	Bidang Pengembang an dan Perbenihan, Bidang Produksi, Bidang Perlindungan & Bidang Usaha dan Penyuluhan			
3.1.2.1	Intesifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)		0	0		0		Jumlah Saprodi	1,750	17 Kelompok Tani, 325 Ha (65.000 Kg Pupuk Anorganik, 4.875 Liter Pupuk Organik Cair, 3.250 Liter Herbisida)	2,618	17 Kelompok Tani, 325 Ha (65.000 Kg Pupuk Anorganik, 4.875 Liter Pupuk Organik Cair, 3.250 Liter Herbisida)	2,618	Jumlah Saprodi	6,986	Seksi Sarana dan Prasarana	18 Kecamatan
									Pupuk Organik 3.730 Ltr						Pupuk Organik 92.768 Ltr			
									Pupuk Kimia 53.450 Kg						Pupuk Kimia 306.308 Kg			
															Pestisida Organik 744 Liter			
									Herbisida 1.492 ltr						Herbisida 13.028 liter			

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.2.2	Intesifikasi Tanaman Perkebunan (Bankeu)	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)		0	0	-	0	-	Pupuk Kimia 10.600 Kg	140	0	-	0	-	Pupuk Kimia 10.600 Kg	140	Seksi Sarana dan Prasarana	Marang Kayu
3.1.2.3	Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi	Jumlah Petani pengguna pupuk bersubsidi yang di bina		400 Orang/ Petani	0	-	320 orang	54	0	-	550 Orang/ Petani	250	550 Orang/ Petani	250	1.520 Orang/ Petani	554	Seksi Sarana dan Prasarana	M. Kaman, M. Badak M. Jawa, Sanga-Sanga, L. Janan, Anggana, K. Janggut
3.1.2.4	Pengadaan Pupuk dan Pestisida Organik (Lada)	Jumlah Pupuk Organik dan Pestisida Organik		Pupuk & Pestisida Organik	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pupuk & Pestisida Organik	-	Seksi Sarana dan Prasarana	18 Kecamatan
				Pupuk Organik 1.200 Liter											Pupuk Organik 1.200 Liter			
				Pestisida Organik 400 Liter											Pestisida Organik 400 Liter			
3.1.2.5	Peningkatan Produksi Perkebunan, Peremajaan Tanaman Lada Rakyat (Bankeu)	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)		0	Pupuk Organik 3.608 liter & Pestisida Organik 1.640 liter	797	0	-	0	-	0	-	0	-	Pupuk Organik 3.608 liter & Pestisida Organik 1.640 liter	797	Seksi Sarana dan Prasarana	
3.1.2.6	Pengadaan Sarana Produksi Berupa Pupuk dan Herbisida Untuk Intesifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)		Pupuk Kimia & Herbisida	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pupuk Kimia & Herbisida	-	Seksi Sarana dan Prasarana	18 Kecamatan
				Pupuk Kimia 168.500 Kg											Pupuk Kimia 168.500 Kg			
				Herbisida 4.050 Liter											Herbisida 4.050 Liter			
3.1.2.7	Pembangunan Jalan Produksi	Panjang Jalan Produksi		0	0	-	0	-	0	-	15 KM	-	15 KM	-	30 KM	-	Seksi Sarana dan Prasarana	M. Jawa, Anggana, Samboja, L. Janan, L.Kulu, K. Bangun, Tgr Seberang, Sebulu, M. Jawa, M. Kaman, Anggana, Samboja, L.Kulu, K. Bangun, M. Badak, M. Kayu
		Panjang Jalan Produksi (Kelapa Sawit)									10 KM		10 KM		20 KM			
		Panjang Jalan Produksi (Karet)									3 KM		3 KM		6 KM			
		Panjang Jalan Produksi (Lada)									2 KM		2 KM		4 KM			Samboja, L. Janan, M. Badak

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.2.8	Pembangunan Embung	Jumlah Embung bagi Komoditi Perkebunan		4 Unit	0	-	0	-	0	-	2 Unit	-	1 Unit	-	7 Unit	-	Seksi Sarana dan Prasarana	Tenggarong, Muara Badak dan Loa Janan
3.1.2.9	Normalisasi Sungai	Panjang Normalisasi Sungai		0	0	-	0	-	0	-	4.500 Meter	-	4.000 Meter	-	8.500 Meter	-	Seksi Sarana dan Prasarana	Muara Jawa, Samboja
3.1.2.10	Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen		0	0	-	0	-	0	-	13 Kelompok Tani	1,424	13 Kelompok Tani	1,424	26 Kelompok Tani	2,847	Seksi Alat dan Mesin	Marang Kayu, Muara Badak, Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Jawa, Loa Janan, Samboja, Loa Kulu.
3.1.2.11	Peyediaan Sarana Panen Pekebunan	Jumlah bantuan alat Panen		bantuan alat Panen	0	-	0	-	bantuan alat Panen	1,332	0	-	0	-	bantuan alat Panen	1,332	Seksi Alat dan Mesin	18 Kecamatan
				Gerobak dorong : 651 unit					225 unit gerobak dorong, 450 buah dodos, 450 buah gancu, 37.500 buah mangkuk sadap, 200 buah pisau sadap, 37.500 buah ring						876 unit gerobak dorong, 1.101 buah dodos, 450 buah gancu, 136.000 buah mangkuk sadap, 398 buah pisau sadap, 37.500 buah ring mangkuk,			
				Dodos : 651 Unit														
				Pisau sadap : 198 buah														
				Mangkok sadap : 98.500 buah														
3.1.2.12	Penyediaan Handsprayer Untuk Pengembangan (Ekstensifikasi) Komoditas Perkebunan	Jumlah Handsprayer		161 Buah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	161 Buah	-	Seksi Alat dan Mesin	18 Kecamatan
3.1.2.13	Inventarisasi Pengawasan, Pemeliaran dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Diperbantukan	Jumlah Alsin Perkebunan yang diinventarisasi		0	0	-	0	-	0	-	205 Alsin	-	208 Alsin	-	413 Alsin	-	Seksi Alat dan Mesin	Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak
3.1.2.14	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	Jumlah Petani		0	0	-	0	-	0	-	Jumlah Petani	710	Jumlah Petani	710	Jumlah Petani	1,420	Seksi Teknologi dan Budidaya	Sanga-Sanga, Sebulu, Muara Jawa, Muara Badak, Loa Janan, Marang Kayu
		Jumlah Petani yang Mendapatkan Bintek									242 orang orang		242 orang		484 orang			Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Sebrang, Muara Kaman, Muara Muntai, Kota Bangun, Loa Janan, Muara
		Jumlah Petani yang Mendapatkan pembinaan									242 orang		242 orang		484 orang			
		Buku Saku									242 Eks		242 Eks		484 eks			

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.2.15	Pilot Proyek Pupuk Dan Pestisida Organik Komoditi Perkebunan (Lada)	Luas Demplot Komoditi Perkebunan (Lada)		0	0	-	0	-	0	-	1 Ha	-	1 Ha	-	1 Ha	-	Seksi Teknologi dan Budidaya	Loa Janan
											Pupuk orga-nik 2.550 kg		Pupuk Orga-nik 2.550 kg		Pupuk organik 5.100 kg			
											Pestisida 70 ltr		Pestisida 60 ltr		Pestisida 130 ltr			
											Bibit 2.000 stek (1 Ha)				Bibit 2.000 stek (1 Ha)			
											Turus 2.000 bh, Hand sprayer 2 bh				Turus 2.000 bh, Hand sprayer 2 bh			
3.1.2.16	Pilot Proyek Komoditas Tanaman Lokal (Aren)	Luas Demplot Komoditi Perkebunan (Aren)		0	0	-	0	-	0	-	14 Ha	-	14 Ha	-	14 Ha	-	Seksi Teknologi dan Budidaya	Kota Bangun, Loa Kulu, Kenohan, Muara Jawa, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu
											13 Keltan, 13 Ha, 312 Ltr Pupuk, 104 Ltr Insekti- sida, 104 Ltr Fungisida, 45 Orang Bimtek, 3 Paket Alsin		312 Ltr Pupuk, 104 Ltr Insektisida, 104 Ltr Fungisida, 45 Orang Bimtek, 3 Paket Alsin		13 Kel. Tani, 13 Ha, 624 Ltr Pupuk, 208 Ltr Insektisida, 208 Ltr Fungisida, 90 Orang Bimtek, 6 Paket Alsin			
											Pupuk organik 480 kg		Pupuk Organik 480 Kg		Pupuk organik 960 kg			
											Pestisida 80 ltr		Pestisida 60 Ltr		Pestisida 140 ltr			
											Bibit 156 btg (1 Ha)				Bibit 156 btg (1 Ha)			
										Handsprayer 2 bh, Gembor 2 bh				Handsprayer 2 bh, Gembor 2 bh				

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.2.17	Pemeliharaan Kebun Dinas	Luas Kebun Dinas yang dipelihara		0	0	-	0	-	15 Ha (8.550 kg Pupuk Anorganik, 60 ltr Herbisida)	175	1) Sawit 16 Ha (Pupuk NPK 9.438 Kg, Herbisida 160 Ltr, Rodentisida 3 Kg, Dodos + Egrek Mesin 2 Unit, Weeder 3 Unit, Hand Sprayer 3 Buah), 2) Kopi 2 Ha (Urea 889 Kg, SP36 1.110 Kg, KCL 667 Kg, Keiserit 444 Kg, Herbisida 24 Ltr, insektisida 10 Ltr, Fungisida 10 Ltr, Gergaji pangkas 1 Buah, Gunting Pangkas 1 Buah), 3) Aren 1 Ha (Pupuk Organik 625 Kg, Insektisida Organik 6 Ltr)	391	1) Sawit 16 Ha (Pupuk NPK 9.438 Kg, Herbisida 160 Ltr, Rodentisida 3 Kg, Dodos + Egrek Mesin 2 Unit, Weeder 3 Unit, Hand Sprayer 3 Buah), 2) Kopi 2 Ha (Urea 889 Kg, SP36 1.110 Kg, KCL 667 Kg, Keiserit 444 Kg, Herbisida 24 Ltr, insektisida 10 Ltr, Fungisida 10 Ltr, Gergaji pangkas 1 Buah, Gunting Pangkas 1 Buah), 3) Aren 1 Ha (Pupuk Organik 625 Kg, Insektisida Organik 6 Ltr)	391	38 Ha	957	Seksi Teknologi dan Budidaya	Loa Kulu, Tenggarong
3.1.2.18	Rehab/Peremajaan Tanaman Lada Rakyat	Luas Peremajaan Tanaman Lada		71 Ha	0	-	0	-	0	-	43 Ha		29 Ha		143 Ha	-	Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan	Samboja, Loa Janan, Muara Badak
				Bibit 142.000 Stek							Bibit 86.000 Stek		Bibit 58.000 Stek		Bibit 144.000 Stek			
											Pupuk Organik 10.750 Ltr		Pupuk Organik 7.250 Ltr		Pupuk Organik 18.000 Ltr			
											Herbisida 172 Ltr		Herbisida 116 Ltr		Herbisida 288 Ltr			
											Hand Sprayer 43 Unit		Hand Sprayer 29 Unit		Hand Sprayer 72 Unit			

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.2.19	Rehab/Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam Rakyat	Luas Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam		0	0	-	0	-	0	-	600 Ha		770 Ha		1.370 Ha	-	Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan	Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu
										Bibit 75.000 Pohon		Bibit 96.250 Pohon		Bibit 171.250 Phn				
										Pupuk Organik 8.400 Ltr		Pupuk Organik 10.780 Ltr		Pupuk Organik 19.180 Ltr				
										Pupuk Kimia 43.200 Kg		Pupuk Kimia 55.440 Kg		Pupuk Kimia 98.640 Kg				
										Herbisida 2.400 Ltr		Herbisida 3.080 Ltr		Herbisida 5.480 Ltr				
										Hand Sprayer 600 Unit		Hand Sprayer 770 Unit		Hand Sprayer 1.370 Unit				
3.1.2.20	Rehab/ Peremajaan Tanaman Karet Rakyat	Luas Peremajaan Tanaman Karet		0	0	-	0	-	15 Ha	284	50 Ha		50 Ha		115 Ha	284	Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan	Marang Kayu
										Bibit 27.500 Pohon		Bibit 27.500 Pohon		Bibit 55.000 Pohon				
										Pupuk Organik 1.200 Ltr		Pupuk Organik 1.200 Ltr		Pupuk Organik 2.400 Ltr				
										Pupuk Kimia 10.000 Kg		Pupuk Kimia 10.000 Kg		Pupuk Kimia 20.000 Kg				
										Herbisida 300 Ltr		Herbisida 300 Ltr		Herbisida 600 Ltr				
										Hand Sprayer 50 Unit		Hand Sprayer 50 Unit		Hand Sprayer 100 Unit				
3.1.2.21	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Jumlah jenis Sarana Perlindungan Perkebunan		0	0	-	0	-	0	-	46 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	400	46 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	400	92 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	800	Seksi Sarana Perlindungan	18 Kecamatan
3.1.2.22	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma		0	0	-	0	-	0	-	70 Lokasi	350	70 Lokasi	350	140 Lokasi	700	Seksi Pengamatan Dan Pengendalian OPT	18 Kecamatan
3.1.2.23	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Perkebunan bagi Petani	Jumlah Kelompok Tani Yang mengikuti Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)		0	0	-	0	-	0	-	100 Orang (4 Kelompok Tani)	-	100 Orang (4 Kelompok Tani)	-	200 Orang (8 Kelompok Tani)	-	Seksi Pengamatan Dan Pengendalian OPT	18 Kecamatan

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.2.25	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pengendalian OPT	Jumlah Lokasi dan Pembinaan APH		0	0	-	0	-	0	-	72 Lokasi	350	72 Lokasi	350	144 Lokasi	700	UPTD Proteksi Tanaman Dan Laboratorium Hayati	18 Kecamatan
3.1.2.26	Pengendalian Lingkungan dan Perlindungan Dampak Perkebunan	Jumlah Pengendalian & Perlindungan Preventif pada PBS dan Kebun Rakyat		0	0	-	0	-	0	-	70 Lokasi	350	70 Lokasi	350	140 Lokasi	700	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan
3.1.2.27	Pembinaan dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah PBS dan Kebun Rakyat yang dibina		0	0	-	0	-	0	-	70 PBS dan Kebun Rakyat	-	70 PBS dan Kebun Rakyat	-	140 PBS dan Kebun Rakyat	-	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan
3.1.2.28	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah Titik Api & KTPA		0	0	-	0	-	0	-	75 Titik Api & 6 KTPA	450	50 Titik Api & 6 KTPA	450	125 Titik Api & 12 KTPA	901	UPTD Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	18 Kecamatan
3.1.2.29	Pengendalian dan Perlindungan Perkebunan	Jumlah Kebun Rakyat dan PBS yang diawasi		55 Lokasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	55 Lokasi	-	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan
3.1.2.30	Brigade Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran lahan dan kebun	Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran lahan dan Kebun		300 Lokasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	300 Lokasi	-	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan
3.1.2.31	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi		0	0	-	0	-	0	-	39 PBS	250	39 PBS	250	78 PBS	500	Seksi Pembinaan Dan Gangguan Usaha	18 Kecamatan
3.1.2.32	Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK	Jumlah Kelompok Tani Yang Didampingi		0	0	-	0	-	0	-	200 Kelompok Tani	200	200 Kelompok Tani	200	400 Kelompok Tani	400	Seksi Penyuluhan	18 Kecamatan
3.1.2.33	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Jumlah Kelompok Tani yang dibina & Jumlah STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Bididaya Tanaman Perkebunan)		0	0	-	0	-	0	-	376 Kelompok Tani	1,663	376 Kelompok Tani	1,663	752 Kelompok Tani	3,326	Seksi Penyuluhan	18 Kecamatan
3.1.2.34	Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan)	Jumlah Penyuluh yang dilatih		0	0	-	0	-	0	-	30 Orang	628	0	-	30 Orang	628	Seksi Penyuluhan	Dalam & Luar Daerah
3.1.2.35	Pendampingan APBN dan APBD Propinsi	Jumlah Kegiatan yang Didampingi		3 Kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 Kegiatan	-	Subbag. Penyusunan Program	18 Kecamatan
3.1.2.36	Sosialisasi Peraturan Perbenihan	Jumlah Peserta Sosialisasi		130 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	130 Orang	-	Seksi Perbenihan	18 Kecamatan

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Panjang Jalan Produksi	Meter	0	653,80	817	0		1.4	1,418	0		0		2.053,80	2,235	Bidang Produksi	
3.1.3.1	Pembangunan Jalan Produksi	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)		0	80 Meter	98	0	-	0	-	0	-	0	-	80 Meter	98	Seksi Sarana dan Prasarana	Loa Janan
3.1.3.2	Pembangunan Jalan Produksi (DAK 2019)	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit)		0	0	-	0	-	1.40 Km	418	0	-	0	-	1.40 Km	418	Seksi Sarana dan Prasarana	Kota Bangun
3.1.3.3	Peningkatan jalan Kelompok Tani Sambera Utama RT 9 Desa Salo Cella, Muara Badak Kecamatan Muara Badak (Bankeu)	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit)		0	573.80 meter	719	0	-	0	-	0	-	0	-	573.80 meter	719	Seksi Sarana dan Prasarana	Muara Badak
3.1.3.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun		0	0	-	0	-	1 Bangunan Kantor	1,000	0	-	0	-	1 Bangunan Kantor	1,000	Seksi Sarana dan Prasarana	Tenggarong
3.1.4	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Luasan Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Ha	154,8	145	-	130	49	110	450	0	-	0	-	110	499	Bidang Perlindungan	
3.1.4.1	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma		55 Lokasi	0	-	11 kecamatan 22 lokasi	49	15 Kecamatan	100	0	-	0	-	93 Lokasi	149	Seksi Pengamatan Dan Pengendalian OPT	18 Kecamatan
3.1.4.2	Pengendalian Dampak Lingkungan dan Perlindungan Perkebunan	Jumlah Kebun Rakyat dan PBS yang diawasi		0	0	-	0	-	70 PBS dan Kebun Rakyat	250	0	-	0	-	70 PBS dan Kebun Rakyat	250	Seksi Pengendalian Lingkungan	18 Kecamatan
3.1.4.3	Proteksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan serangan hama penyakit dan gulma		0	0	-	0	-	72 Kel. Tani	100	0	-	0	-	72 Kel. Tani	100	UPTD Proteksi Tanaman Dan Laboratorium Hayati	18 Kecamatan
3.1.4.4	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan		35 Jenis, 650 Kg, 1.050 Liter	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	35 Jenis, 650 Kg, 1.050 Liter	-	Seksi Sarana Perlindungan	18 Kecamatan
3.1.4.5	Peningkatan teknis pengendalian hama dan penyakit bagi petani perkebunan	Jumlah Petani Yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pengendalian Hama penyakit dan gulma		140 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	140 Orang	-	Seksi Pengamatan Dan Pengendalian OPT	18 Kecamatan

				Kenstra (2016)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.5	Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Penurunan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Kasus	23	21	-	19	50	17	350	0	-	0	-	17	400	Bidang Perlindungan & Bidang Usaha dan Penyuluhan	
3.1.5.1	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran		0	0	-	0	-	100 Titik Api	100	0	-	0	-	100 Titik Api	100	UPTD Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	18 Kecamatan
3.1.5.2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi		0	0	-	6 PBS	50	0	-	0	-	0	-	12 PBS	50	Seksi Pembinaan Dan Gangguan Usaha	18 Kecamatan
3.1.5.3	Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Kasus Gangguan Usaha Perkebunan Yang ditangani		0	0	-	0	-	17 Kasus GUP	250	0	-	0	-	17 Kasus GUP	250	Seksi Pembinaan Dan Gangguan Usaha	18 Kecamatan
3.1.5.4	Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Jumlah Perkebunan Swasta Yang Di Nilai		13 Sertifikat	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13 Sertifikat	-	Seksi Pembinaan Dan Gangguan Usaha	18 Kecamatan
3.1.5.5	Pembinaan Pengelolaan bahan baku & pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (PKS)	Frekuensi Pembinaan Pengelolaan bahan baku & pemanfaatan limbah kelapa sawit		13 PKS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13 PKS	-	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil	18 Kecamatan
3.1.6	Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	1) Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pekebun 2) Pertumbuhan Jumlah Pekebun	1) Nilai NTP 2) KK	1) 98 2) 47658	1) 101 2) 50565	-	1) 105 2) 54015	-	1) 109 2) 58122	690	0 0	0 0	0 0	-	1) 109 2) 58122	690	Bidang Usaha dan Penyuluhan, UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat &	
3.1.6.1	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tenggarong	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		15 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Tenggarong	Kecamatan Tenggarong
3.1.6.2	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tenggarong Seberang	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		12 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Tenggarong Seberang	Kecamatan Tenggarong Seberang
3.1.6.3	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Badak	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		19 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	19 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Muara Badak	Kecamatan Muara Badak
3.1.6.4	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Loa Janan	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		20 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	20 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Loa Janan	Kecamatan Loa Janan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.6.3	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Badak	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		19 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	19 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Muara Badak	Kecamatan Muara Badak
3.1.6.4	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Loa Janan	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		20 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	20 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Loa Janan	Kecamatan Loa Janan
3.1.6.5	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Anggana	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		9 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Anggana	Kecamatan Anggana
3.1.6.6	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Sangasanga	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		7 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Sangasanga	Kecamatan Sangasanga
3.1.6.7	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Marang Kayu	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		12 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Marang Kayu	Kecamatan Marang Kayu
3.1.6.8	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Samboja	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		33 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	33 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Samboja	Kecamatan Samboja
3.1.6.9	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Loa Kulu	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		19 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	19 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Loa Kulu	Kecamatan Loa Kulu

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan (Dalam Juta)												Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.6.10	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kembang Janggut	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		17 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	17 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Kembang Janggut	Kecamatan Kembang Janggut
3.1.6.11	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kota Bangun	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		27 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	27 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Kota Bangun	Kecamatan Kota Bangun
3.1.6.12	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Tabang	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		9 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Tabang	Kecamatan Tabang
3.1.6.13	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Muntai	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		10 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Muara Muntai	Kecamatan Muara Muntai
3.1.6.14	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Sebulu	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		19 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	19 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Sebulu	Kecamatan Sebulu
3.1.6.15	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Kenohan	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		6 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Kenohan	Kecamatan Kenohan
3.1.6.16	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Kaman	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		26 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	26 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Muara Kaman	Kecamatan Muara Kaman

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.6.17	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Jawa	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		9 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	9 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Muara Jawa	Kecamatan Muara Jawa
3.1.6.18	Pembinaan dan Pelayanan Kelembagaan Petani Pekebun di Kec. Muara Wis	Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Pembinaan		11 Kelompok Tani	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11 Kelompok Tani	-	UPTD Penyuluhan Dan Pengembangan Perkebunan Rakyat Kec. Muara Wis	Kecamatan Muara Wis
3.1.6.19	Studi Nilai Tukar Petani (NTP) Pekebun	Jumlah Dokumen Nilai Tukar Petani (NTP)		1 Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	-	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	18 Kecamatan
3.1.6.20	Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan)	Jumlah Penyuluh yang dilatih		0	0	-	0	-	20 Orang	170	0	-	0	-	20 Orang	170	Seksi Penyuluhan	Dalam & Luar Daerah
3.1.6.21	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Jumlah Kelompok Tani yang dibina		0	0	-	0	-	126 Kelompok Tani	378	0	-	0	-	126 Kelompok Tani	378	Seksi Penyuluhan	18 Kecamatan
3.1.6.22	Pembinaan dan Evaluasi Kerjasama Kemitraan Usaha Perkebunan (Plasma)	Jumlah Kerjasama Kemitraan yang di Bina		1.500 KK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.500 KK	-	Seksi Pembinaan dan Gangguan Usaha	18 Kecamatan
3.1.6.23	Pengembangan Data Base Perkebunan	Data dan Peta Sebaran		0	0	-	-	-	1 Dokumen Data Base (Action Plan Kawasan Perkebunan)	142	0	-	0	-	2 Dokumen Data Base	142	Subbag. Penyusunan Program & Keuangan	18 Kecamatan
3.1.7	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Produktivitas Komoditi Perkebunan : 1. Sawit 2. Karet 3. Lada 4. Kelapa 5. Kopi 6. Kakao 7. Aren	Kg/ Ha/ Tahun	1. 18100 2. 1430 3. 1220 4. 350 5. 1000 6. 1195 7. 600	1. 18700 2. 1470 3. 1260 4. 360 5. 1060 6. 1205 7. 780	47	1. 19300 2. 1530 3. 1310 4. 375 5. 1130 6. 1220 7. 1220	52	1. 20000 2. 1590 3. 1380 4. 395 5. 1220 6. 1240 7. 1350	170	0	-	0	-	1. 20000 2. 1590 3. 1380 4. 395 5. 1220 6. 1240 7. 1350	269	Bidang Produksi	
3.1.7.1	Penyediaan Alat Pengelola Hasil Perkebunan	Jumlah Bantuan Alat Pengelola Hasil Perkebunan		3 Unit UPH	20 Unit	47									3 Unit UPH	47	Seksi Alat dan Mesin	Kec. Kenohan dan Kec. Ma Badak

No	Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Awal Periode Renstra (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.1.7.1	Penyediaan Alat Pengelola Hasil Perkebunan			1 Unit UPH Karet											1 Unit UPH Karet		Seksi Alat dan Mesin	Kec. Kenohan dan Kec. Ma Badak
				2 Unit UPH Aren											2 Unit UPH Aren			
3.1.7.2	Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Diperbantukan	Jumlah Alsin Perkebunan yang diinventarisasi		0	0	-	13 desa / 5 kecamatan (13 Alsin)	520	0	-	0	-	0	-	13 desa / 5 kecamatan (13 Alsin)	520	Seksi Alat dan Mesin	Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak
3.1.7.3	Penyediaan Alat Penyulingan Minyak kayu Putih dan Rumah Produksi	Tersedianya UPH kayu putih		1 unit UPH dan 1 bangunan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit UPH dan 1 bangunan	-	Seksi Alat dan Mesin	Kec. Loa Janan
3.1.7.4	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	Jumlah Petani yang Mendapatkan BinteK		165 orang	0	-	0	-	50 orang	1700	0	-	0	-	215 Orang	1700	Seksi Teknologi dan Budidaya	18 Kecamatan
3.1.7.5	Demplot Pupuk Dan Pestisida Organik Komoditi Perkebunan	Luas Demplot Komoditi Lada dan Aren		2 Ha	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Ha	-	Seksi Teknologi dan Budidaya	Loa Janan dan Kenohan
3.1.8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Harga Pasar Komoditi Perkebunan : 1. Sawit Rakyat 2. Sawit PBS 3. Karet 4. Lada 5. Kelapa 6. Kopi 7. Kakao 8. Aren	Rp / Kg	1. 1258 2. 1629 3. 6629 4. 115625 5. 5375 6. 22375 7. 25500 8. 18850	1. 1246 2. 1629 3. 6629 4. 106825 5. 4277 6. 22821 7. 19083 8. 17065	-	1. 954 2. 1529 3. 6536 4. 65004 5. 4078 6. 24366 7. 20250 8. 17599	-	1. 1000 2. 1550 3. 6884 4. 82000 5. 4277 6. 25000 7. 22000 8. 18500	200	1. 1050 2. 1600 3. 7050 4. 100000 5. 4500 6. 26000 7. 23000 8. 20000	600	1. 1150 2. 1650 3. 7400 4. 110000 5. 4800 6. 27000 7. 24000 8. 21500	600	1. 1150 2. 1650 3. 7400 4. 110000 5. 4800 6. 27000 7. 24000 8. 21500	1,400	Bidang Usaha dan Penyuluhan	
3.1.8.1	Pengawasan dan	Jumlah Objek yang		0	0		0		0		80 Objek	400	80 Objek	400	160 Objek	800		
3.1.8.2	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pameran yang diikuti		7 Kali	0	-	0	-	2 Kali Pameran	200	2 Kali Pameran	200	6 Kali	200	17 Kali	600		
3.1.8.3	Pembinaan Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan	Jumlah Pembinaan Pemasaran Produksi Perkebunan		30 Objek	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30 Objek	-		
Total						6,836		4,591		18,703		18,167		19,667		67,964		

Sumber Data : Hasil Analisis (2019)

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menilai efektivitas suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan suatu indikator kinerja yang merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan memiliki perbedaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut. Sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja merupakan sesuatu yang secara nyata dapat dihitung karena akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Dinas Perkebunan yang merupakan OPD di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki penetapan standar pelayanan sebagai cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja yang digunakan oleh Dinas Perkebunan tidak terlepas dari teknis pengembangan subsektor perkebunan pada perencanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator kinerja tersebut dirumuskan dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan teknis pembangunan berbasis sektor pertanian (khususnya subsektor perkebunan) dengan acuan tujuan dan sasaran RPJMD itu sendiri.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya pengukuran kinerja dan penentuan indikator kinerja yang sesuai. Permasalahan tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome, dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya, sedangkan pada bisnis hanya berorientasi pada mata uang sebagai keuntungan usaha. Meskipun begitu, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berusaha optimal untuk menyusun indikator kinerja sebagai landasan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, indikator kinerja yang telah disusun melalui berbagai tahapan ini akan memacu setiap elemen di lingkungan Dinas Perkebunan untuk dapat meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerjanya sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan akan berbanding lurus dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Adapun indikator kinerja Dinas Perkebunan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1. : Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	CC (63)	B (65)	B (68)	BB (72)	BB (76)	A (81)	A (81)
2	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	0%	0%	0%	5%	5%	5%	15%
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	8,67%	8,68%	9,03%	9,39%	9,76%	10,15%	10,15%

Sumber Data : Hasil Analisis (2018)

VIII . PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 s/d 2021 ini dapat disusun. Perubahan RENSTRA ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 2 (dua) tahun kedepan, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya RENSTRA ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 s/d 2021 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 10 Desember 2019

An. Kepala Dinas,
Sekretaris,


Hamdani, SE, M.Si
NIP. 19640909 198902 1 002